PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
DEPO MITRA MANDIRI
maju bersama

LAPORAN TAHUNAN



2024

BPR BANK PERKREDITAN RAKYAT

LPS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

PT.BPR Depo Mitra Mandiri
Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
serta merupakan peserta penjamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

1. Pengantar

Kondisi perekonomian tercatat pada Badan Pusat Statistik (BPS) Pada triwulan III-2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencatat pertumbuhan (y-on-y) yang stabil. Kelompok provinsi di Pulau Jawa masih menjadi penyumbang ekonomi terbesar dengan peranan sebesar 56,84 persen dari PDB nasional dan mencatat pertumbuhan sebesar 4,95 persen (y-on-y).

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan bimbinganNya, sehingga kegiatan operasional BPR Depo Mitra Mandiri pada tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik.

Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham serta Dewan Komisaris yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta petunjuk, sehingga kegiatan operasional BPR Depo Mitra Mandiri dapat berjalan dengan baik sampai dengan saat ini.

Sebagai gambaran lengkap atas pencapaian kegiatan usaha tahun 2024 dengan ini disampaikan laporan kegiatan perseroan yang meliputi antara lain informasi umum, laporan keuangan perseroan tahun buku 2024 serta catatan atas laporan keuangan.

Semoga laporan ini dapat diterima dengan baik dan Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan bimbinganNya kepada Pemegang Saham, Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan BPR Depo Mitra Mandiri.

2. Data Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

a. Dewan Komisaris:

i. Komisaris Utama

Fasika Khaerul Zaman berdomisili di Jakarta Selatan, dengan pendidikan terakhir S2 di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2009 serta telah memiliki Sertifikasi Kompetensi Komisaris yang akan berakhir pada 20 Desember 2026.

Berdasarkan Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-191/KR.02/2021 tanggal 07 Desember 2021 dengan Jabatan sebagai Komisaris Utama serta Akta Notaris Yatini Nomor : 818 Tanggal 30 November 2023 yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.09-0277248 dimana periode masa jabatan 01 Desember 2023 sd 31 Maret 2025.

ii. Komisaris

Irianto berdomisili di Depok, dengan pendidikan terakhir S2 di Monash University pada tahun 1993 serta telah memiliki Sertifikasi Kompetensi Komisaris yang akan berakhir pada 07 Juli 2028.

Berdasarkan Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-87/KR.02/2023 tanggal 12 Juli 2023 dengan Jabatan sebagai Komisaris serta Akta Notaris Yatini Nomor : 818 Tanggal 30 November 2023 yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.09-0277248 dimana periode masa jabatan 01 Desember 2023 sd 31 Maret 2025.

b. Direksi

i. Direktur Utama

Teti Ofianti berdomisili di Depok, dengan pendidikan terakhir S1 di STIE Taman Siswa pada tahun 2014 serta telah memiliki Sertifikasi Kompetensi Direktur yang akan berakhir pada 30 Desember 2027.

Berdasarkan dengan Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-54/KR.021/2023 tanggal 15 November 2023 dengan Jabatan sebagai Direktur Utama serta Akta Notaris Yatini Nomor : 818 Tanggal 30 November 2023 yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.09-0277248 dimana periode masa jabatan 01 Desember 2023 sd 31 Maret 2025.

ii. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Meulya Putri berdomisili di Bogor, dengan pendidikan terakhir S1 di STIE Manajemen Bisnis Indonesia pada tahun 2016 serta telah memiliki Sertifikasi Kompetensi Direktur yang akan berakhir pada 25 Oktober 2026.

Berdasarkan Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-7/KO.12/2023 tanggal 15 November 2023 dengan Jabatan sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan serta Akta Notaris Yatini Nomor : 818 Tanggal 30 November 2023 yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.09-0277248 dimana periode masa jabatan 01 Desember 2023 sd 31 Maret 2025.

3. Data Pejabat Eksekutif

a. Kepala Marketing

Wiji Sutiawan berdomisili di Pamulang mulai menjabat pada tanggal 02 Mei 2023 berdasarkan surat pengangkatan nomor 020/SK-PSN/0523 dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 029/OJK-DEPO/0523

b. PE Audit Internal

Hadidjah berdomisili di Jakarta Timur mulai menjabat pada tanggal 05 Juli 2023 berdasarkan surat pengangkatan nomor 047/SK-PSN/0723 dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 047/OJK-DEPO/0723

c. PE Manajemen Resiko, Kepatuhan dan APU PPT

Kristia Ranggaini berdomisili di Pamulang mulai menjabat pada tanggal 10 Agustus 2023 berdasarkan surat pengangkatan nomor 055/SK-PSN/0823 dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 055/OJK-DEPO/0823

d. PE Teknologi Informasi

Rizky Ardiansyah berdomisili di Depok mulai menjabat pada tanggal 05 Maret 2024 berdasarkan surat pengangkatan nomor 013/SK-PSN/0324 dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 019/OJK-DEPO/0324

e. PE SDM dan Umum

Faisal Hawary berdomisili di Depok mulai menjabat pada tanggal 05 Maret 2024 berdasarkan surat pengangkatan nomor 015/SK-PSN/0324 dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 020/OJK-DEPO/0324

f. Kepala Cabang Pondok Aren

Bonando Tondang Banua berdomisili di Jakarta Timur mulai menjabat pada tanggal 15 Oktober 2024 berdasarkan surat pengangkatan nomor 052/SK-PSN/1024 dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 052/OJK-DEPO/1024

g. Kepala Cabang Cibinong

Eliya berdomisili di Cibinong mulai menjabat pada tanggal 09 Mei 2022 berdasarkan surat pengangkatan nomor 027/SK-PSN/0522 dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 027/OJK-DEPO/0522

h. Kepala Cabang Depok

Deni Karya Pamuji berdomisili di Depok mulai menjabat pada tanggal 08 Mei 2023 berdasarkan surat pengangkatan nomor 031/SK-PSN/0523 dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 031/OJK-DEPO/0523

i. Kepala Penunjang Operasional

Chorry Tiarasari berdomisili di Depok mulai menjabat pada tanggal 09 November 2021 berdasarkan surat pengangkatan nomor 044/SK-PSN/1121 dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan nomor 044/OJK-DEPO/1121

4. Data Kepemilikan Saham

Tahun 2024 terdapat penambahan modal disetor sesuai Akta Notaris Isa Meilia, S.H, M.Kn. No. 655 Tanggal 31 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum

Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0036946

Sehingga komposisi kepemilikan saham pada tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Nama	saham	Nominal	Prosentase
1.	PT. Hajar Aswad Tani Indonesia	5,464	5,464,000,000	95%
2.	Fasika Khaerul Zaman	287	287,000,000	5%
	Total	5,751	5,751,000,000	100%

5. Riwayat Pendirian BPR

PT. BPR Depo Mitra Mandiri selanjutnya disebut “Bank” adalah perseroan terbatas yang didirikan pada tanggal 29 Maret 2005 berdasarkan akta Notaris Titiek Soebekti, SH No. 2 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-13263 HT.01.01.TH.2005 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 55 tanggal 12 Juli 2005 Tambahan No. 7261.

Pada tahun 2008 telah dilakukan perubahan anggaran dasar perseroan sesuai ketentuan Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dengan akta Notaris Titiek Soebekti No. 07 tanggal 12 Juni 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-47454.AH.01.02 tahun 2008 Tanggal 04 Agustus 2008 dan telah dilaporkan pula ke Bank Indonesia dengan surat No. 031/DEPO/BI/0808 tanggal 27 Agustus 2008.

Bank telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia mengenai
Izin usaha BPR No.7/39/KEP.GBI/2005 tanggal 11 Juli 2005 dengan lokasi kantor Pusat di Jl. Margonda Raya No.23 B-2 Depok Jawa Barat. Namun sesuai dengan akta Notaris Isa Meilia, S.H, M.Kn No. 543 tanggal 26 Mei 2023 dan disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 0032376-AH.01.02 TAHUN 2023 lokasi Kantor Pusat berpindah alamat di Ruko Cibubur Times Square Jalan Transyogi Rt 001 Rw 010, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat.

Berdasarkan pada Akta Notaris No.543 Tanggal 26 Mei 2023 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan No. AHU-0032376.AH.01.02. Tahun 2023 Bank DMM telah melakukan perubahan nomenklatur (tata nama) BPR sebagai berikut berikut:

Semula : PT. BPR Perkreditan Rakyat Depo Mitra Mandiri

Menjadi : PT. BPR Perekonomian Rakyat Depo Mitra Mandiri

Profil

Nam Lengkap BPR	: PT. BPR Depo Mitra Mandiri
Nama Panggilan	: Bank DMM
Alamat Kantor	: Ruko Cibubur Times Square Jalan Transyogi Rt 001 Rw 010, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat.
Telepon	: (021) 22817575
Tanggal Berdiri	: 29 Maret 2005
Jenis Usaha	: Perbankan
Status	: Perseroan Terbatas
Website	: bprdepomitramandiri.co.id
Email	: bpr.depomitramandiri@yahoo.co.id
Instagram	: bank_dmm
Modal Inti	: 13.689.347.584,-
Jumlah Jaringan	: 3 Kantor Cabang

Dimana Laporan Keuangan tahun 2024 telah diaudit dengan Kantor Akuntan Publik Drs. Arifin Faqih, Ak.,CPA dengan Nama Akuntan Publik Bharata,Arifin,Mumajad dan Sayuti adapun opini akuntan publik wajar tanpa pengecualian.

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting Tahun 2024

i. Asset

Posisi total asset per 31 Desember 2024 tercapai sebesar Rp. 108.257.919.350,- dan mencapai 115.53% dari realisasi tahun 2023 dengan komposisi dari Penempatan Pada Bank Lain mencapai Rp. 33.971.794.768,- dan Kredit Yang Diberikan (setelah dikurangi provisi dan ditambahkan biaya transaksi) mencapai Rp. 70.570.318.492,-.

ii. Kredit yang diberikan

Posisi kredit yang diberikan kepada masyarakat setelah dikurangi provisi, administrasi, ditambah biaya transaksi Rp. 71.890.750.510,- dan dikurangi penyisihan kerugian Rp. 1.320.432.018,- menjadi sebesar Rp.70.570.318.492,- dan mencapai 118.08% dari realisasi tahun 2023.

iii. Kewajiban

Posisi total kewajiban per 31 Desember 2024 tercapai sebesar Rp. 93.349.616.914,- dan mencapai 116.46% dari realisasi tahun 2023 dengan komposisi dari Tabungan mencapai Rp. 6.171.548.444,-, Deposito mencapai Rp.59.936.493.992,-, Simpanan dari Bank Lain mencapai Rp.19.700.000.000,- dan Pinjaman Diterima mencapai Rp. 6.167.299.995,-

iv. Laba bersih

Pencapaian Laba Bersih tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.473.153.008,- dan mencapai 122.89% dibandingkan realisasi tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 2.012.564.580,-

v. Taksiran Pajak Penghasilan

Tarif pajak yang digunakan pada tahun 2024 sesuai dengan undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Mengingat omset pada tahun 2024 di atas Rp. 4.8 miliar dan dibawah Rp. 50 miliar maka perhitungan pajak menggunakan 2 tarif perhitungan sebagai berikut :

1) Tarif sebesar 11% untuk pajak penghasilan yang mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto sampai dengan 4,8 miliar)
2) Tarif sebesar 22% untuk pajak penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto 4,8 - 50 miliar)

   Pada tahun 2024 omset PT. BPR Depo Mandiri sebesar Rp. 19.254.393.283,- sehingga tarif pajak menggunakan seperti tersebut di atas.

vi. Pendapatan dan Beban

1) Pendapatan

   Total pendapatan operasional dan non operasional yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 19.252.893.283,- atau mencapai 124.24% dan mencapai 141.77% dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp.13.580.350.004,-

   Adapun rincian pendapatan tersebut diperoleh dari :

   a) Untuk pendapatan bunga kontraktual sebesar Rp. 17.402.707.074,-
   b) Pendapatan Amortisasi Provisi sebesar Rp. 992.798.129,-
   c) Pendapatan Lainnya Rp. 641.940.151,-
   d) Pendapatan non operasional sebesar Rp. 215.447.929,-

2) Beban

   Total Beban yang telah dikeluarkan adalah sebesar Rp. 16.146.241.626,- dan mencapai 45.90% dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp.11.066.280.049,- dengan rincian biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut :

   a) Beban bunga kontraktual Rp. 9.416.167.862,- atau mencapai 185.54% dari anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 5.075.023.564, peningkatan tersebut dikarenakan adanya deposito dengan nominal besar yang dijaminkan sebagai agunan back to back.
   b) Beban Pemasaran sebesar Rp. 436.623.387,- atau mencapai 90.96% dari anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 480.000.000,-
   c) Beban administrasi dan umum sebesar Rp. 6.060.366.071,- atau mencapai 87.26% dari anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 6.944.732.781,-

d) Beban operasional lainnya sebesar Rp. 185.807.098,- atau mencapai 82.50% dari anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 225.221.171,-

e) Beban Non Operasional sebesar Rp. 47.377.207,- atau mencapai 115.55% dari anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 41.001.197,-

7. Kualitas Aset Produktif dan Rasio Keuangan.

Rasio keuangan perusahaan pada akhir tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

	Keterangan	Realisasi
I	Permodalan	
	Rasio KPMM (CAR)	39.52%
II	Aktiva Produktif	
	1. NPL	3.88%
	2. Pemenuhan PPAP	100.00%
III	Rentabilitas	
	1. ROA	2.21%
	2. ROE	18.09%
	3. BOPO	84.54%
IV	Likuiditas	
	1. LDR	109.82%
	2. Cash Ratio	9.28%

8. Penjelasan Mengenai Non Performing Loan (NPL)

NPL (*Non Performing Loan*) Nett posisi 31 Desember 2024 sebesar 3,88%, penyebab hal tersebut dikarenakan :

1.Usaha Nasabah yang mengalami penurunan

2.Nasabah berhenti atau diberhentikan bekerja

3.Nasabah sakit yang berkepanjangan

Langkah dan Upaya yang dilakukan dalam menurunkan NPL ditahun 2024

1. Negosiasi penyelesaian kredit bermasalah antara debitur beserta keluarganya dengan pihak Bank, agar dengan sadar menjual agunanya secara sukarela atau pihak keluarga membantu penyelesaian kredit nya.
2. Melakukan pengambilalihan agunan (AYDA)
3. Melakukan penjualan agunan secara sukarela maupun melalui lelang KPKNL untuk debitur yang tidak kooperatif dalam penyelesaian kredit bermasalahnya
4. Dilakukan penagihan intensif

9. Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan dan Perubahan Penting Lain

Pada tahun 2024, BPR Depo Mitra Mandiri mulai membuka layanan *Safe Deposit Box* (SDB) dan menggarap sektor pembiayaan terhadap Kredit Pensiun dengan kerjasama

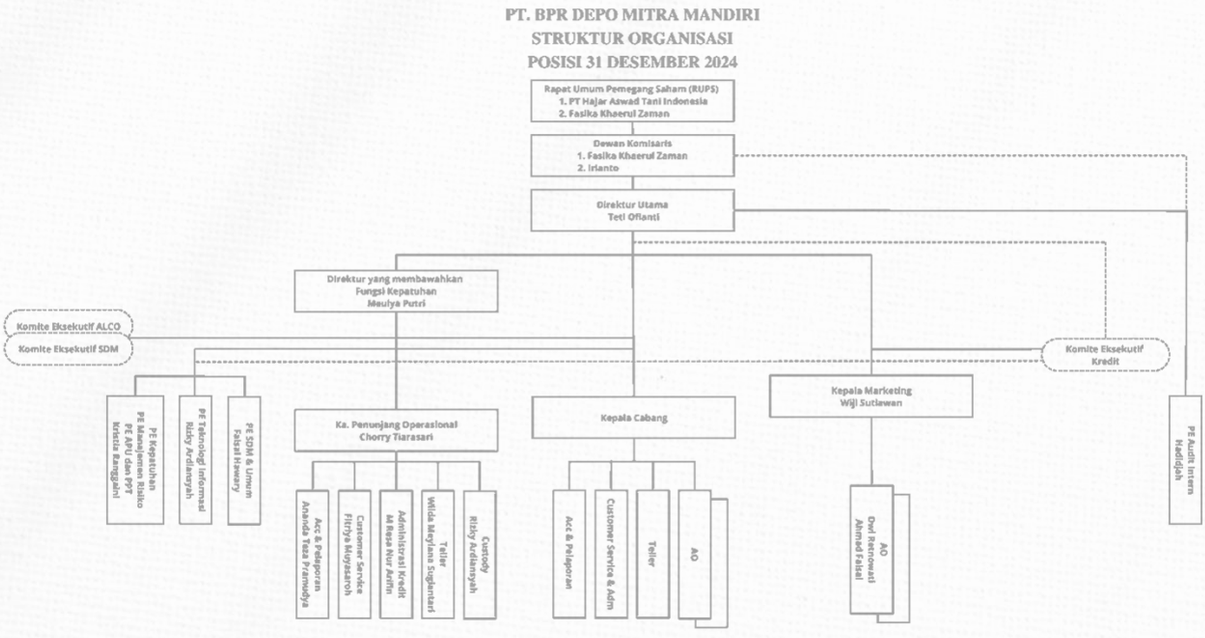
dengan Koperasi (Agen) dengan target pembiayaan pensiunan seperti Pensiun PNS, Pensiun TNI, Pensiun POLRI, Veteran dan Janda/Duda dari pensiunan

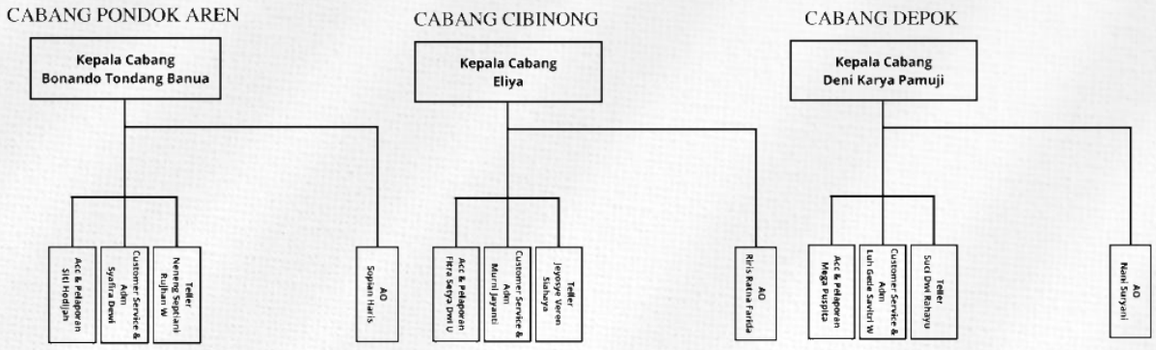
10. Strategi dan Kebijakan Manajemen

Adapun strategi dan kebijakan manajemen yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan selalu berdasarkan Visi Perusahaan yaitu menjadi perusahaan yang unggul, menghasilkan laba, dan tumbuh secara berkelanjutan. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Menawarkan kembali kredit kepada nasabah lunas;
b. Memberikan penawaran *top up*/*repeat order* kepada debitur *existing* yang lancar;
c. Menambah Petugas Jasa Pemasaran Lepas (PJPL) dan memberikan incentif kepada PJPL;
d. Pemberian edukasi literasi keuangan kepada ibu-ibu rumah tangga di lingkungan nasabah BPR Depo Mitra Mandiri berada;
e. Menambah kerjasama dengan Vendor untuk pembiayaan Kredit Karyawan dan *Fintech;*
f. Melakukan kerjasama dengan Open Bank dalam hal pembayaran listrik, pulsa, PAM dll;
g. Melakukan pelatihan dan pendidikan agar mutu karyawan dapat terus meningkat dari waktu ke waktu;
h. Selalu menjaga kondisi Tingkat Kesehatan perusahaan dalam kondisi yang sehat Pada Faktor Manajemen Risiko, Tata Kelola, Permodalan dan Rentabilitas.

11. Stuktur Organisasi





12. Bidang Usaha

Bidang Usaha PT BPR Depo Mitra Mandiri, dengan kategori kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Penghimpunan Dana

i. Tabungan Depo Harian

Tabungan dengan bunga menarik yang dihitung secara harian, penyetoran miinimal Rp. 50.000,- , penarikan tabungan dapat dilaksanakan setiap saat pada jam kerja serta tabungan dijamin Pemerintah (Lembaha Penjamin Simpanan/LPS). Dengan suku bunga 4,75% per tahun

ii. TabunganKu

TabunganKu adalah rekening tabungan yang diwajibkan Bank Indonesia dengan suku bunga 2% dan tabungan tersebut diwajibkan untuk nasabah yang melakukan akad kredit. Dengan suku bunga 2,00% per tahun

iii. Tabungan Hajatan

Tabungan Depo Hajatan untuk mewujudkan rencana tertentu (hajatan) dikemudian hari seperti Tabungan Pendidikan, Tabungan Sunatan, Pernihakan, Hari Raya, Tabungan untuk libutan. Tabungan hanya dapat diambilpada saat jatuh tempo, sehingga dana akan tersedia pada saat dibutuhkan, dijamin Pemerintah (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS). Dengan suku bunga5,75% per tahun.

iv. Tabungan Arisan

Tabungan Arisan adalah produk lanjutan tabungan depo, dimana tabungan tersebut diundi untuk mendapatkan bonus pada setiap bulan dan hadiah menarik diperiode terakhir.

v. Deposito Berjangka

Deposito adalah simpanan yang penarikanya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Setoran minimum deposito adalah Rp.1.000.000,-

b. Produk Kredit

i. Kredit Guna Mandiri

Kredit Guna Mandiri adalah penyediaan dana kepada debitur dengan tujuan modal kerja, investasi dan konsumtif dengan agunan SHM/SHGB, Deposito dan BPKB Motor/Mobil

ii. Kredit Guna Mandiri Karyawan

Kredit Guna Mandiri Karyawan adalah penyediaan dana bagi karyawan perusahaan yang dipergunakan untuk investasi, modal kerja maupun konsumtif dengan sistem pembayaran melalui pemotongan gaji oleh pihak perusahaan, koperasi atau dibayarkan langsung oleh karyawan yang bersangkutan

iii. Kredit Pensiun

Kredit Pensiun adalah penyediaan dana bagi pensiunan dalam hal ini bekerjasama dengan mitra pembiayaan yaitu Koperasi

c. Layanan

i. SDB (Safe Deposit Box)

Merupakan layanan penitipan barang yang disediakan oleh bank kepada nasabah berupa laci dengan penutupan yang dapat dikunci yang diperuntukan bagi nasabah tanpa bank mengetahui rincian atas barang yang disimpan dalam laci tersebut

13. Teknologi Informasi

Saat ini BPR menggunakan sistem *corebanking* NBP'Sys dari PT. Nusantara Bona Pasogit dan sampai saat ini berjalan dengan baik.

14. Perkembangan dan Target Pasar

Target pasar yang dituju oleh BPR Depo Mitra Mandiri yaitu tetap mengutamakan pemberian kredit kepada debitur Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), serta tetap melakukan pemberian kredit karyawan dan kredit pensiun.

15. Jumlah, Jenis dan Lokasi kantor

Kegiatan operasional BPR Depo Mitra Mandiri di dukung oleh 4 (empat) kantor yaitu Kantor Pusat dan 3 (tiga) Kantor Cabang yang berlokasi sebagai berikut :

a. Kantor Pusat

Komplek Ruko Cibubur Times Square B1 No. 6-8, Jl Transyogi Rt 001/010 Jatikarya, Jatisampurna, Bekasi.
Telp. (021) 2281 7575

b. Kantor Cabang Pondok Aren :

Komplek Ruko Regia Blok RB – 1 No. 36 Jalan Graha Bintaro Utama Komplek Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Telp. (021) 7345 0840, Faks (021) 7345 0746

c. Kantor Cabang Cibinong

Ruko Perum Cibinong Griya Asri Jl. KSR Dadi Kusmayadi Blok R3 No. 4 Kel. Tengah, Kec. Cibinong, Bogor,

Telp. (021) 8791 9767, Faks (021) 8791 9768

d. Kantor Cabang Depok

Komplek Ruko Saladin Square B-27 , Jl Margonda Raya No. 39, Depok.

Telp. (021) 752 2323, Fax. (021) 77202767

16. Kerjasama BPR dengan Bank, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lain atau lembaga lain

Ditahun 2024, kerjasama DMM dengan bank/lembaga lain terjadi dalam hal:

a. Kerjasama *linkage program* yaitu dengan Bank Jabar Banten
b. Kerjasama penjaminan kredit dan asuransi kerugian dengan:
   i. PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda
   ii. PT. BPJS Ketenagakerjaan
c. Kerjasama penyedia jasa corebanking dengan PT. NBP Sys
d. Kerjasama pengikatan Agunan dan jasa kenotariatan lain dengan notaris-notaris diwilayah kerja DMM
e. Kerjasama pembiayaan *peer to peer (P2P) lending*
f. Kerjasama dengan BPR lain dalam rangka menjalin hubungan Antar Bank Aktiva antaranya :
   i. BPR Bantoru Perintis
   ii. BPR Ciledug Dhana Semesta
   iii. BPR Danaberkah Lestari
   iv. BPR Citra Bersada Abadi
   v. BPR Nusantara Bona Pasogit 32
   vi. BPR Koperindo Jaya
   vii. BPR Arta Pundi Mekar
   viii. BPR Lingga Sejahtera
   ix. BPR Bintara Pratama Sejahtera
   x. BPR Rasyid
   xi. BPR Niji
   xii. BPR Wingsati

xiii. BPR Ulima Djumpa Marom
xiv. BPR Nusantara Bona Pasogit 11
xv. BPR Artha Kurnia Raharja
xvi. BPR Central Sejahtera
xvii. BPR Dana Mandiri Bogor
xviii. BPRS Botani Bina Rahmah
xix. BPR Handalan Danagraha
xx. BPR Antar Guna
xxi. BPR Karunia Kanaka
xxii. BPR Ceper
xxiii. BPR Mitra Sejahtera Lestari
xxiv. BPR Pinang Artha
xxv. BPRS Artha Madani
xxvi. BPR Indomitra Artha Pertiwi
xxvii. BPR Kredit Mandiri Indonesia
xxviii. BPR Artha Bersama
xxix. BPR Artatama Sejahtera
xxx. BPR Rama Ganda
xxxi. BPR Luna Sinar Indonesia

g. Kerjasama dengan BPR lain dalam rangka menjalin hubungan Antar Bank Pasiva antaranya :
i. BPR Artadamas Mandiri
ii. BPR Supra Arta Persada
iii. BPR Panca Dana Rakyat
iv. BPR Prima Sejahtera
v. BPR Dana Nagoya
vi. BPR Apta Sejahtera
vii. BPR Dana Lestari
viii. BPR Cibitung Permai
ix. BPR Mitra Prima Lestari
x. BPR Multi Artha
xi. BPR Bank Boyolali
xii. BPR Xen
xiii. BPR Indomitra Artha
xiv. BPR Hasa Mitra Makasar
xv. BPR Nusantara Bona Pasogit 15
xvi. BPR Daya Lumbung Asia

xvii. BPR Metropolitan
xviii. BPR Lestari Bali
xix. BPR Indra Candra
xx. BPR Kranji Krida
xxi. BPR Prismaberlian Danarta
xxii. BPR Cahaya Arthasejati
xxiii. BPR Darmawan Adhiguna
xxiv. BPR Sukma Kemang Agung
xxv. BPR Koinworks Sejahtera
xxvi. BPR Mangga Jaya Utama
xxvii. BPR Multi Sembada Dana
xxviii. BPR Hasa Mitra Jawa Barat
xxix. BPR Akar Budaya Dana Indonesia
xxx. BPR Brata Bhakti Sejahtera
xxxi. BPR Mitra Telagasari Utama
xxxii. BPR Surya Yudhakencana
xxxiii. BPR Lestari Banten
xxxiv. BPR Lestari Jakarta

17. Kepemilihan Saham

No	Nama Pemegang Saham	Nominal Saham	Prosentase %
1	PT. Hajar Aswad Tani Indonesia	5.464.000.000,-	95
2	Fasika Khaerul Zaman	287.000.000,-	5
	Jumlah	5.751.000.000,-	100

18. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Bidang Tugas dan Komposisi Pegawai

Jumlah tenaga kerja sampai dengan akhir tahun 2024 terdiri dari 4 orang Pengurus, 29 orang Karyawan serta 4 orang Jasa Pemasaran, Jasa Pelayanan Umum dan Peserta Magang. Adapun rincian tenaga kerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut :

Karyawan	Semester II th 2023		Semester II th 2024	
	Jml	Pendidikan	Jml	Pendidikan
Kepala Marketing	1	S1	1	S1
Kepala Support	-		-	
Kepala Kantor Cabang	3	S1/SMA	3	S1/D3/SMA
Kepala Grup	-		-	
Kepala Kantor Kas	-		-	
AO dan Marketing	7	S1/SMA	7	S1/SMA
Analis				
Audit Intern	1	S1	1	S1
PE Teknologi Informasi	-		1	S1
PE SDM dan Umum	-		1	S1
PE Kepatuhan, PE APU PPT dan PE Manajemen Risiko	1	S1	1	S1
Kepala Penunjang Operasional	1	SMK	1	SMK
CS/CSA	4	S1/D3/SMA	4	S1/D3/SMA
Teller	4	S1/SMA	4	S1/SMA
Adminstrasi Kredit	1	SMK	1	SMK
Accounting	4	S1/SMA	4	S1/SMA
Staf TI	1	S1		
Staff SDM dan Pelaporan	1	S1		
Jumlah	29		29	
Agen				
JAO, PJPU dan Magang	5	SMK	4	SMK
Total Tenaga Kerja	34		33	

Jumlah karyawan tersebut adalah untuk mendukung kegiatan operasional di Kantor Pusat, Kantor Cabang Pondok Aren, Kantor Cabang Cibinong dan Kantor Cabang Depok

b. Kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan pada tahun 2024 telah dilakukan pendidikan baik oleh pihak internal maupun ekternal perusahaan. Adapun materi pendidikan yang diselenggarakan antara lain :

i. Seminar Nasional DPD Perbarindo DKI Jaya & Sekitarnya Dampak Ketentuan Baru (SAK EP) Pada Industri BPR/BPRS Dan *Sharing Experiences* Pelaku Industri BPR (Pendiri & Komut BPR Universal)
ii. Penyusunan laporan audit tahunan BPR sesuai SEOJK No.7/SEOJK.03/2016
iii. Penandatanganan PKS dan Juknis Dukcapil Seminar Nasional Perlindungan Data Pribadi
iv. Pelatihan Pengembangan Kualitas SDM
v. Study Banding Ke BPR Dana Mitra Sakti
vi. Proses Analisis Slik & Rekening Koran
vii. Pelatihan APU PPT dengan tema "Penyusunan Individual Risk Assessment (IRA)

viii. Pelatihan penerapan aplikasi CKPN pada sistem NBPSys
ix. Seminar Bisnis BPR dan Top 100 BPR 2024, Transformasi dan Road Map Pengembangan BPR 2024 - 2027
x. Sertifikasi Level 3 Pelaksana Kredit
xi. Sertifikasi Level 4 Audit Internal
xii. Pelatihan Penggabungan, Peleburan, dan Konsolidasi BPR
xiii. Pelatihan Manajemen SDM sesuai POJK 09/2024 Pasal 23 & POJK 19/2023
xiv. Pelatihan Implementasi POJK 09/2024 Penerapan Tata Kelola BPR & BPRS
xv. Pelatihan Implementasi CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) & PPKA Kaitan dengan Manajemen Risiko Kredit, KPMM & Pedoman Akuntansi SAKEP
xvi. Pelatihan Implementasi Perlindungan Konsumen (POJK 22/2023) BPR- Seminar Banking Mastery Forum 2024: Arah Kebijakan Ekonomi dan Finansial Pemerintah Baru
xvii. Seminar Evaluasi Kinerja BPR/BPRS Tahun 2024 dan Sosialisasi Ketentuan Penggabungan BPR atau BPRS
xviii. Survailen Level 6 Direktur
xix. Pelatihan Implementasi POJK 12/2024 Strategi Anti Fraud & Laporan SAF
xx. Seminar Persiapan Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)
xxi. Pelatihan Penilaian Jaminan Pada BPR
xxii. Pelatihan Basic Credit Analysis Pada BPR
xxiii. Sosialisasi Kantor Pajak Kebon Jeruk
xxiv. Pelatihan Analisa Laporan Keuangan & Analisa Rekening Koran
xxv. Seminar Nasional dan Rakernas Perbarindo
xxvi. Sosialisasi Program Premi Penjaminan LPS
xxvii. Pelatihan Online Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat BPR-BPRS
xxviii. Pelatihan Aplikasi Zpro RBB "Membuat Rencana Bisnis 2025"
xxix. Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil
xxx. Pelatihan APU PPT & PPPSPM serta Sosialisasi Pelindungan Data Pribadi
xxxi. Pelatihan Tentang Lelang Acta De Comand, serta Seluk Beluk Sertifikat Elektronik
xxxii. Capacity Building BPR & BPRS 2024 "Peningkatan Kepatuhan Ketentuan dan Pengembangan Bisnis BPR dan BPRS Berbasis Teknologi Informasi"

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
DEPO MITRA MANDIRI
maju bersama

LAPORAN TATA KELOLA

TATA KELOLA PT. BPR DEPO MITRA MANDIRI (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE)*

Tata Kelola PT. BPR Depo Mitra Mandiri - *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang mengatur perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Sebagai bank yang selalu tumbuh dan berkembang, PT. BPR Depo Mitra Mandiri menyadari bahwa pentingnya *Good Corporate Governance* (GCG) lebih dari sekedar kepatuhan atas peraturan yang wajib dilaksanakan, namun berupaya menjadikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai budaya. Budaya *Good Corporate Governance* (GCG) yang semakin kuat hingga mengakar akan mampu menjaga dan meningkatkan daya saing PT. BPR Depo Mitra Mandiri dalam bisnis dan pencapaian visinya. Dan Penerapan Tata Kelola menjadi faktor penilaian tingkat kesehatan BPR yang perlu diperhatikan penilaiannya.

Dengan Tata Kelola yang baik, tentunya perusahaan diharapkan tetap *survive* ditengah-tengah persaingan bisnis jasa keuangan yang semakin ketat. Tata Kelola yang baik menghadirkan manajemen perusahaan yang sehat dan profesional, menjalankan prinsip kehati-hatian dalam mewujudkan visi dan misi PT. BPR Depo Mitra Mandiri. Hal ini kemudian akan semakin menguatkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank.

PT. BPR Depo Mitra Mandiri menekankan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dalam dua hal penting. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. Kedua hal tersebut diterapkan berdasarkan lima prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu:

1. *Transparancy* (Keterbukaan), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (Akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. *Responsibility* (Pertanggung jawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independence* (Kemandirian), yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (Kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun yang ingin dicapai PT. BPR Depo Mitra Mandiri dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi dan pemantauan kinerja manajemen serta adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan peraturan yang berlaku.

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan Penerapan Tata Kelola

PT. BPR Depo Mitra Mandiri menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PT. BPR Depo Mitra Mandiri ditujukan antara lain untuk :

a. Melaksanakan Visi PT. BPR Depo Mitra Mandiri, untuk menjadi "Perusahaan yang unggul, menghasilkan laba dan tumbuh secara berkelanjutan sehingga dapat memenuhi harapan pemilik dan *stakeholder."*
b. Melaksanakan Misi PT. BPR Depo Mitra Mandiri, untuk "Menjadi tempat yang sehat untuk berkarya, berkehidupan dan mengembangkan profesionalisme bagi seluruh karyawan."
c. Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (*shareholders)* dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
d. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).
e. Meningkatkan kepercayaan para investor.

2. Referensi

Penyusunan kebijakan tata kelola perusahaan PT. BPR Depo Mitra Mandiri dilakukan dengan mengacu kepada:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

3. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

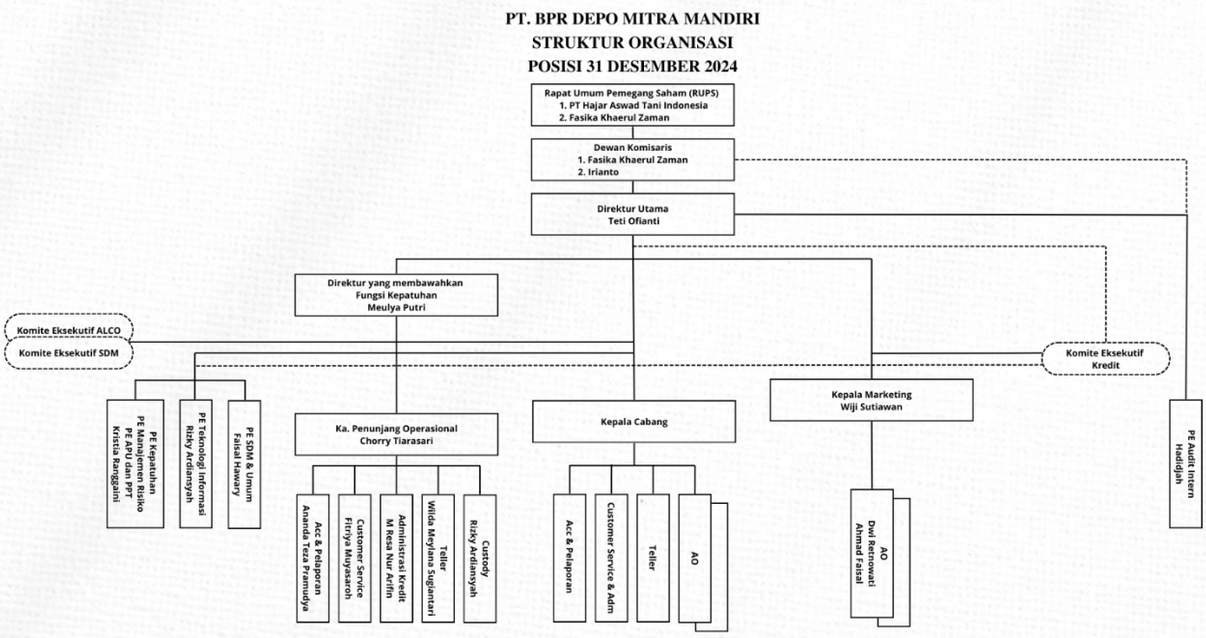
Penerapan tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap PT. BPR Depo Mitra Mandiri. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Melalui penerapan pinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) diharapkan PT. BPR Depo Mitra Mandiri dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan kompetitif.

Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, PT. BPR Depo Mitra Mandiri berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tata kelola BPR

4. Struktur Organisasi PT. BPR Depo Mitra Mandiri

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di PT. BPR Depo Mitra Mandiri mencerminkan adanya upaya penerapan prinsip tata kelola serta sistem pengendalian internal yang telah berjalan dengan baik.

Struktur Tata Kelola PT. BPR Depo Mitra Mandiri



Struktur tata kelola perusahaan PT. BPR Depo Mitra Mandiri terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Dewan Komisaris;
3. Direktur Utama;
4. Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan;
5. Ka. Marketing;
6. Pejabat Eksekutif yang berfungsi sebagai :
    a. Pejabat Eksekutif Kepatuhan;
    b. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko;
    c. Pejabat Eksekutif APU dan PPT;
    d. Pejabat Eksekutif Teknologi Informasi;
    e. Pejabat Eksekutif SDM dan Umum;
    f. Pejabat Eksekutif Audit Intern
7. Ka. Cabang;
8. Ka. Penunjang Operasional.

Struktur tata kelola perusahaan tersebut di atas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab, serta fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance)* PT. BPR Depo Mitra Mandiri tahun 2024 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Laporan Penerapan Tata Kelola *(Good Corporate Govermance)* PT. BPR Depo Mitra Mandiri sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Transparansi Penerapan Tata Kelola BPR sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, mengungkap seluruh aspek

penerapan Tata Kelola paling kurang meliputi :

a. Ringkasan Hasil Penilaian *(Self Assessment)* atas Penerapan Tata Kelola
b. Pengungkapan penerapan Tata Kelola yaitu :
    i. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi.
    ii. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris.
    iii. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.
c. Kepemilikan saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR yaitu:
    i. Kepemilikan saham Anggota Direksi pada BPR.
    ii. Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR.
d. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain yaitu :
    i. Kepemilikan saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.
    ii. Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.
e. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR yaitu :
    i. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR.
    ii. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.
f. Hubungan keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain yaitu :
    i. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.
    ii. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.
g. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.
h. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah.
i. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Dalam 1 (satu) Tahun.
j. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.
k. Jumlah Penyimpangan Intern *(Internal Fraud)*.
l. Permasalahan hukum yang dihadapi.

m. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

n. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan lain.

2. Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Tahun 2024 periode semester 1 dan semester 2.

C. TRANSPARASI PENERAPAN TATA KELOLA

a. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	: Komplek Ruko Cibubur Times Square B1 No. 6-8, Jl. Transyogi RT.001/010, Jatikarya, Jatisampurna, Bekasi 17435
Nomor Telepon	. (021) 2281 7575
Penjelasan Umum	: Penyusunan laporan transparansi pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independent dan Fairness.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola	: Nilai 2 (dua)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola	. Manajemen BPR Depo Mitra Mandiri telah melakukan penerapan tata kelola dengan baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan oleh manajemen BPR.

b. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola yaitu :

i. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	NIK*)	: 3276066410770005
	Nama	: Teti Ofianti
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab: Direktur Utama bertanggung jawab terhadap tugas yang membidangi : a. Audit Intern; b. Penghimpunan Dana; c. Penyaluran Dana; d. Edukasi, Literasi dan Inklusi;	

	e. Pengembangan Bisnis.	
2.	NIK*)	: 3201135409910001
	Nama	: Meulya Putri
	Jabatan	: Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab: Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab terhadap tugas yang membidangi : a. Fungsi Kepatuhan; b. Fungsi Manajemen Risiko; c. Fungsi APU dan PPT; d. Teknologi Informasi; e. Sumber Daya Manusia dan Umum; f. Penunjang Operasional.	
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris**): 1. Melakukan progres action plan penggabungan dengan BPR Dana Mitra Sakti. 2. Melakukan rekrutmen JAO dan AO dimana tahun 2024 bertambah JAO 2 orang dan AO sebanyak 1 orang.		

ii. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	NIK*)	: 3173052712720009
	Nama	: Fasika Khaerul Zaman
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab: Komisaris Utama bertanggung jawab terhadap tugas yang membidangi : a. Audit Intern; b. Penghimpunan Dana; c. Penyaluran Dana;	

	d. Edukasi, Literasi dan Inklusi; e. Pengembangan Bisnis.	
2.	NIK*)	: 3173020106630005
	Nama	: Irianto
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab: Komisaris bertanggung jawab terhadap tugas yang membidangi : a. Fungsi Kepatuhan; b. Fungsi Manajemen Risiko; c. Fungsi APU dan PPT; d. Teknologi Informasi; e. Sumber Daya Manusia dan Umum; f. Penunjang Operasional.	
Rekomendasi kepada Direksi: 1. Rencana Penggabungan dengan BPR Dana Mitra Sakti agar dilakukan monitoring *action plan.* 2. Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja sesuai Rencana Bisnis yang telah ditetapkan, agar dilaksanakan sehingga pertumbuhan dan perkembangan organisasi kedepannya berkembang lebih baik.		

iii. Tidak terdapat Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

c. Kepemilikan saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR yaitu :

i. Kepemilikan saham Anggota Direksi pada BPR

No	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3276066410770005	Teti Ofianti	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3201135409910001	Meulya Putri	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

ii. Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3173052712720009	Fasika Khaerul Zaman	287,000,000	5	258,000,000	5
2	3173020106630005	Irianto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

d. Kepemilikan saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain yaitu :

i. Kepemilikan saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	3276066410770005	Teti Ofianti	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3201135409910001	Meulya Putri	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

ii. Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	3173052712720009	Fasika Khaerul Zaman	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3173020106630005	Irianto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

e. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR yaitu :

i. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3276066410770005	Teti Ofianti	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3201135409910001	Meulya Putri	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

ii. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3173052712720009	Fasika Khaerul Zaman	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
2	3173020106630005	Irianto	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada

f. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain yaitu :

i. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3276066410770005	Teti Ofianti	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3201135409910001	Meulya Putri	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

ii. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3173052712720009	Fasika Khaerul Zaman	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	3173020106630005	Irianto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

g. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS yaitu :

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	614,400,000	2	241,920,000
2	Tunjangan	2	238,965,226	2	15,152,851
3	Tantiem	2	169,750,000	2	74,000,000
4	Kompensasi berbasis saham	0	-	0	-
5	Remunerasi lainnya	2	153,600,000	2	60,480,000
Total Remunerasi			1,176,715,226		391,552,851
No	Jenis Fasilitas Lain				
1	Perumahan	-	-	-	-
2	Transportasi	2	277,300,000	-	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-	-	-
4	Fasilitas Lainnya	-	-	-	-
Total Fasilitas Lain			277,300,000		-
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			1,454,015,226		391,552,851

h. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah yaitu :

No	Keterangan	Skala Perbandingan
1	Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	2.24 : 1
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1.77 : 1
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1.36 : 1
4	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi	3.80 : 1
5	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi	4.41 : 1

i. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun yaitu :

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	10-Jan-24	2	- Evaluasi Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - APU dan PPT - *Brand Name* Bank DMM di Cabang - Kerjasama Ruang Kerja - DPLK

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
2	14-Mar-24	2	- Evaluasi Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - APU dan PPT - Kerjasama Ruang Kerja - Purna Jabatan Pengurus - Pengembangan Aplikasi *Corebanking* - Perizinan *Safe Deposit Box* - Kerusakan Gedung Kantor Pusat - Website DMM - Laporan Tahunan
3	17-Apr-24	2	- Evaluasi Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - APU dan PPT - Pengembangan Aplikasi *Corebanking* - Perizinan *Safe Deposit Box* - Kerusakan Gedung Kantor Pusat - Website DMM - Laporan Tahunan
4	15-May-24	2	- Evaluasi Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - APU dan PPT - Pengembangan Aplikasi *Corebanking* - Perizinan *Safe Deposit Box* - Kerusakan Gedung Kantor Pusat - Purna Jabatan Pengurus - Jajaki Kredit Pensiun
5	13-Jun-24	2	- Evaluasi Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - APU dan PPT - Pengembangan Aplikasi *Corebanking* - Perizinan *Safe Deposit Box* - Jajaki Kredit Pensiun
6	10-Jul-24	2	- Evaluasi Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - APU dan PPT - Tindak Lanjut Pemeriksaan OJK - Pengembangan Aplikasi *Corebanking* - Produk *Safe Deposit Box*

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
7	8-Aug-24	2	- Evaluasi Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - APU dan PPT - Tindak Lanjut Pemeriksaan OJK - Rencana Tindak - Lain-Lain
8	6-Sep-24	2	- Evaluasi Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - APU, PPT dan PPPSPM - Tindak Lanjut Pemeriksaan OJK - Penggabungan BPR - Pengembangan aplikasi *corebanking* - Undangan debitur PASI - Renovasi Gedung Kantor Pusat
9	15-Oct-24	2	- Evaluasi Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - APU, PPT dan PPPSPM - Tindak Lanjut Pemeriksaan OJK - Penggabungan BPR - Laporan Literasi dan Inklusi - Pengembangan aplikasi *Corebanking* - Renovasi Gedung Kantor Pusat - Ruang Kerja
10	7-Nov-24	2	- Evaluasi Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - APU, PPT dan PPPSPM - Penggabungan BPR - Laporan Literasi dan Inklusi - Pengembangan aplikasi *Corebanking* - Pengurusan Direksi dan Dewan Komisaris
11	9-Dec-24	2	- Pembahasan Rencana Bisnis 2025 - Resume Laporan Keuangan - Rasio Proyeksi - Rekrutmen dan Inventaris 2025 - Strategi Bisnis dan Kebijakan - Lain-Lain
12	9-Dec-24	2	- Evaluasi Rencana Bisnis - Isu Strategis - Evaluasi Kebijakan Strategis - APU, PPT dan PPPSPM - Penggabungan BPR - Laporan Literasi dan Inklusi - Lain-Lain

j. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris yaitu :

No	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	3173052712720009	Fasika Khaerul Zaman	12	0	100%
2	3173020106630005	Irianto	12	0	100%

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris selama tahun 2024 adalah Fasika Khaerul Zaman dan Irianto dengan frekuensi kehadiran fisik 12 kali.

k. Jumlah penyimpangan intern *(internal fraud)* yaitu :

Penyimpangan internal (*internal fraud*) adalah penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap. Selama tahun 2024 PT. BPR Depo Mitra Mandiri tidak terdapat penyimpangan internal dengan laporan sebagai berikut :

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus (satuan) yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumny	Tahun Laporan	Tahun Sebelumny	Tahun Laporan	Tahun Sebelumny	Tahun Laporan	Tahun Sebelumny	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Tidak ditindaklanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0

l. Permasalahan hukum yang dihadapi yaitu :

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	2	0
Total	2	0

Terdapat gugatan terkait dengan 1 (satu) Kredit debitur dimana BPR menjadi turut tergugat dan 1 (satu) Kredit debitur dimana debitur sedang masuk dalam PKPU yang saat ini sedang proses penyelesaian.

m. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan di PT. BPR Depo Mitra Mandiri tidak ada, adapun laporannya sebagai berikut :

No	Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan			Pengambilan Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan	NIK			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

n. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kepentingan politik selama periode tahun 2024 tidak ada , Adapun laporannya sebagai berikut :

No	Tanggal Pelasanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerimaan Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
1	-	-	-	-	-	-

D. Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola Tahun 2024.

Pada tahun 2024, PT. BPR Depo Mitra Mandiri melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola PT. BPR Depo Mitra Mandiri (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat. Penilaian tersebut mencakup 2 (dua) aspek yaitu:

1. Aspek Kualitatif dan
2. Aspek Kuantitatif

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat penerapan Tata Kelola diterapkan pada 12 (dua belas) Faktor Penilaian, namun dikarenakan PT. BPR Depo Mitra Mandiri memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- maka untuk faktor Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas dan fungsi komite tidak dinilai, maka faktor yang dinilai hanya sebanyak 11 (sebelas) faktor yaitu:

1. Aspek pemegang saham;
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi;
3. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris;
4. Penanganan benturan kepentingan;

5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko dan strategi anti *fraud*, termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas maksimum pemberian kredit BPR;
10. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi;
11. Rencana bisnis BPR.

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan Penerapan Tata Kelola pada Tahun 2024 semester 2 dengan total penilaian tata kelola 2 dan dikategorikan ke dalam **"Peringkat 2 (dua)".**

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR Depo Mitra Mandiri Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola Tahun 2024

Nilai Komposit	Predikat Komposit
2	Peringkat 2 (dua)

Analisis

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*self assessment*) terhadap aspek Kualitatif dan Kuantitatif pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola sudah baik sesuai penilaian dari hasil *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola.
2. Tidak ada Penyimpangan internal (*internal fraud*) adalah penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Depo Mitra Mandiri Posisi Laporan tahun 2024.

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
DEPO MITRA MANDIRI
maju bersama

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Kata Pengantar

Pada tahun 2024, PT. BPR Depo Mitra Mandiri mengimplementasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2024. Implementasi ini selaras dengan POJK No. 51/POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Program kerja yang dirancang dalam RAKB diterapkan oleh PT. BPR Depo Mitra Mandiri dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keberlanjutan.

BPR (Bank Perekonomian Rakyat), sebagai bagian dari entitas Lembaga Jasa Keuangan (LJK), memahami betul urgensi pengelolaan keuangan berkelanjutan dengan berpegang pada prinsip *triple bottom line* yakni *people* (kemaslahatan masyarakat) , *profit* (laba) serta *planet* (kelestarian lingkungan) dalam operasional bisnis Bank melalui harmonisasi aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).

PT. BPR Depo Mitra Mandiri, selaku institusi perantara, memiliki peran penting yang krusial. Sebagai lembaga yang mengumpulkan dana dari masyarakat (DPK) dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman, BPR harus cermat dalam memilih debitur. Prioritas harus diberikan pada usaha yang tidak merusak lingkungan, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan keuntungan melalui pendapatan bunga kredit.

PT. BPR Depo Mitra Mandiri memiliki komitmen kuat untuk mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan. Hal ini merupakan upaya kolektif sektor jasa keuangan dalam mendukung realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) dan keberlangsungan bisnis bank. Mengabaikan isu sosial dan lingkungan dapat meningkatkan risiko, terutama risiko kredit akibat potensi gagal bayar *(default)* dari debitur yang bisnisnya merugikan lingkungan dan menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

SR (*Sustainability Report*) PT. BPR Depo Mitra Mandiri Tahun 2024 ini menyajikan data dan informasi terkait performa keberlanjutan Bank, mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, yang ditujukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Sesuai dengan regulasi OJK, PT. BPR Depo Mitra Mandiri dengan modal inti di bawah Rp 50 miliar, wajib menyusun Laporan Keberlanjutan mulai tahun 2025, yaitu untuk periode Laporan Keberlanjutan Tahun 2024. Oleh karena itu, PT. BPR Depo Mitra Mandiri menyusun Laporan Keberlanjutan Tahun 2024 yang mencakup informasi periode 1 Januari hingga 31 Desember 2024.

Laporan Keberlanjutan ini disusun dengan merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/ POJK.03/2017.

1. Pendahuluan dan Strategi Keberlanjutan

Tentang Laporan Keberlanjutan

Sesuai POJK No. 51 /POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan pasal 10 secara substantif mewajibkan BPR untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (LK) paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya. Untuk itu BPR wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan (LK) atau SR ***(Sustainability Report)*** Tahun 2024 ke OJK paling lambat tanggal 30 April 2025 bersamaan dengan Laporan Tahunan BPR Tahun 2024.

Laporan Keberlanjutan *(Sustainability Report)* adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

Mengacu pada Lampiran 2 POJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan bahwa format penulisan Laporan Keberlanjutan sebagai berikut:

1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan
2. Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup)
3. Profil Singkat BPR/BPRS
4. Penjelasan Direksi
5. Tata kelola keberlanjutan
6. Kinerja keberlanjutan
7. Verifikasi tertulis dari pihak independen
8. Lembar umpan balik *(feedback*) untuk pembaca dan
9. Tanggapan BPR/BPRS terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.

Acuan dan Standar Penyusunan Laporan Keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan PT. BPR Depo Mitra Mandiri tahun 2024 disusun dengan mengakomodir standar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Laporan Keberlanjutan ini tidak lepas dari laporan tahunan yang telah disusun laporan keuangan teraudit untuk tahun buku 2024. PT. BPR Depo Mitra Mandiri membuat dan melaporkan kinerja keberlanjutan dalam periode 1 (satu) tahun buku (tahunan) mulai tahun 2024 ini. Informasi yang disajikan dalam Laporan keberlanjutan PT. BPR Depo Mitra Mandiri tahun 2024 ini memuat data dan informasi yang dikumpulkan dalam 1 (satu) tahun yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Prinsip penetapan konten dalam Laporan ini didasarkan pada POJK 51/ POJK.03/2017 dan disusun berdasarkan 2 prinsip, yaitu prinsip isi dan kualitas.

Prinsip isi meliputi:

1. Konteks berkelanjutan: Laporan Keberlanjutan *(Sustainability Report)* ini disusun sejalan dengan konteks keuangan berkelanjutan.
2. Kelengkapan: Informasi disajikan sebagai informasi kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan kelengkapan bagi pembaca.

Prinsip kualitas adalah:

1. Keseimbangan: Informasi terkait capaian dan prestasi, serta tantangan disampaikan sesuai dengan kondisi perusahaan.
2. Komparabilitas: Data yang disampaikan dalam laporan disajikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Akurasi: Angka dan informasi telah diperiksa secara internal Perusahaan sehingga diyakini akurasinya.
4. Ketepatan waktu: Laporan ini disajikan tepat waktu bersama dengan Laporan Tahunan.
5. Kejelasan: Informasi yang disajikan dalam laporan mudah untuk dipahami.

Topik material dalam Laporan ini adalah topik-topik yang telah diprioritaskan oleh organisasi untuk dicantumkan dalam laporan. Dimensi yang digunakan untuk menentukan prioritas, antara lain, adalah dampak bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dampak dalam Laporan ini termasuk di dalamnya yang bernilai positif. Penetapan aspek material dan batasan didasarkan pada isu- isu yang berpengaruh signifkan bagi PT. BPR Depo Mitra Mandiri serta seluruh pemangku kepentingan.

Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, BPR mengacu pada 8 (delapan) Prinsip keuangan berkelanjutan, dan 3 (tiga) prioritas sesuai POJK No. 51/2017. Delapan prinsip keuangan berkelanjutan yang dikembangkan oleh PT. BPR Depo Mitra Mandiri adalah:

1. Investasi yang bertanggung jawab; adalah pendekatan investasi yang mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola dalam keputusan investasi yang bertujuan agar dapat mengelola risiko secara lebih baik. Kami menerapkan prinsip ini melalui pemberian kredit yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dengan menganalisi potensi risiko yang ditimbulkan dari usaha yang dibiaya oleh Bank.
2. Prinsip Strategi dan Praktik Bisnis Berkelanjutan; Kami menerapkan prinsip ini dengan menuangkannya pada kebijakan keberlanjutan yang dituangkan dalam dokumen RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) yang menjadi landasan PT. BPR Depo Mitra Mandiri kami dalam menjalankan bisnis berkelanjutan di kegiatan usaha Bank.
3. Prinsip Pengelolaan Risiko Sosial dan Lingkungan Hidup; Kami telah memiliki prinsip kehati- hatian *(Prudential Banking)* dalam mengukur risiko yang dikelola dalam Sistem

Informasi Manajemen Risiko (SIMR) Bank. Selain risiko-risiko finansial, kami juga melakukan proses manajemen risiko khususnya mengukur risiko pemberian kredit atau pinjaman yang bersentuhan langsung dengan aspek sosial dan lingkungan hidup, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

4. Prinsip Tata Kelola; Kami menerapkan tata kelola keberlanjutan (ekonomi, lingkungan dan sosial) yang dibangun berdasarkan prinsip- prinsip penerapan GCG (*Good Corporate Governance*), yaitu transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan kewajaran.
5. Prinsip Komunikasi yang Informatif; Kami menyediakan laporan yang informatif mencakup strategi, tata kelola, kinerja dan produk Bank yang dapat dengan mudah diakses oleh para *stakeholder* melalui situs web PT. BPR Depo Mitra Mandiri https://bprdepomitramandiri.co.id
6. Prinsip Inklusif; Bank menjamin ketersediaan dan keterjangkauan produk dan/ atau jasa yang dapat dengan mudah diakses oleh nasabah. Bank memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang mudah dan merata terhadap layanan yang keuangan PT. BPR Depo Mitra Mandiri.
7. Prinsip Pengembangan Sektor Unggulan Prioritas; Dalam menyusun program keberlanjutan, kami mempertimbangkan sektor-sektor unggulan prioritas yang telah kami tetapkan dalam RAKB (Rencana Aksi Keuangan Bank). Hal ini kami lakukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan mendukung program pemerintah dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.
8. Prinsip Koordinasi dan Kolaborasi; Kami membuka diri untuk berkomunikasi dan berkerja sama dengan lembaga atau pemerintahan setempat terkait Bisnis Berkelanjutan dalam rangka penyelarasan strategi keberlanjutan Bank. Hal ini terlihat dari keanggotaan perusahaan pada perbarindo dan partisipasi dalam mendukung kegiatan- kegiatan yang memberdayakan masyarakat.

Sedangkan prioritas RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) adalah:

1. Peningkatan Kredit dan Penyaluran Dana
2. Pengembangan Kemampuan Intern BPR

Strategi Keberlanjutan

Strategi keuangan berkelanjutan disusun berdasarkan pertimbangan visi dan misi Bank dalam implementasi keuangan berkelanjutan. Bagi Bank, penerapan keuangan berkelanjutan bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan, namun juga sebagai strategi untuk mewujudkan visi Bank khususnya dalam penerapan prinsip inklusi keuangan.

Segmen UMKM yang menjadi sasaran utama Bank dalam pelayanan jasa keuangan diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi. Selain itu, melalui pengembangan produk dan/ atau jasa keuangan berwawasan lingkungan, Bank berupaya

meningkatkan peran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs - *Sustainable Development Goals)*. Hal ini diwujudkan dalam berbagai upaya, di antaranya dengan menyusun rencana kerja, dan mengembangkan RAKB sesuai dengan ketentuan regulator.

Sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab dan Lingkungan Perseroan Terbatas, PT. BPR Depo Mitra Mandiri mulai menerapkan prinsip-prinsip *go green company* sejak penerapan Keuangan Berkelanjutan dengan menjalankan kegiatan-kegiatan diantaranya :

1. Mengampanyekan efisiensi penggunaan air di setiap toilet yang berada di lingkungan kantor BPR dengan “Gunakan air seperlunya”, “Hemat air”, atau “Matikan air setelah selesai digunakan”.
2. Mengampanyekan lingkungan kerja menjadi lebih sehat dengan motto “BERSIH itu SEHAT”.
3. Menjalankan program “Hemat Energi” dengan pembatasan penggunaan AC dan listrik setelah jam kerja dan mematikan lampu di ruangan yang tidak digunakan.

2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan

Tabel Ikhtisar Kinerja Aspek Ekonomi

Nominal uang dalam ribuan rupiah

Keterangan	2024	2023	2022
Pendapatan Operasional Bank (Rp)	19.055.466	13.170.726	10.533.282
Laba Bersih Bank (Rp)	2.473.153	2.012.565	1.972.631
Kinerja Aspek Ekonomi terkait Keberlanjutan			
Jumlah jenis produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan	3	3	3
Nominal produk dan/atau jasa yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan (Rp)	0	0	0
Persentase total portofolio kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total portofolio (%)			
a. Penghimpunan Kredit (%)	15	21	42
b. Penghimpunan Dana (%)	13	13	-28

Pemberian layanan keuangan di segmen UMKM, yang menjadi fokus utama Bank, merupakan segmen pasar yang sangat potensial. UMKM, yang termasuk dalam salah satu kategori KUB (Kredit Usaha Berkelanjutan), saat ini telah menjadi pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini sesuai dengan prinsip investasi bertanggung jawab dimana Bank mempertimbangkan peningkatan keuntungan ekonomi dan kesejahteraan sosial nasabah dalam penyaluran kredit maupun dana

Aspek Lingkungan Hidup

Tabel Ikhtisar Kinerja Aspek Lingkungan Hidup

Nominal uang dalam satuan rupiah penuh

Keterangan	2024	2023	2022
Beban Penggunaan ATK (Rp)	24.726.304	22.835.300	22.305.390
Beban Penggunaan Listrik (Rp)	70.688.721	53.959.224	35.156.650
Beban Penggunaan Air (Rp)	2.916.600	2.494.600	1.029.100
Beban Penggunaan BBM (Rp)	42.319.534	51.587.430	29.134.777

Kriteria KUB (Kredit Usaha Berkelanjutan) yang diharapkan untuk didukung oleh lembaga keuangan mencakup efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Bank menyadari bahwa untuk mendorong masyarakat mengembangkan kegiatan usaha yang mempertimbangkan dampak lingkungan harus dimulai dari cara Bank beroperasi.

Bank telah menempatkan operasional bank ramah lingkungan sebagai bagian dari rencana strategis keuangan berkelanjutan. Dalam rangka memastikan kegiatan operasional dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, budaya kesadaran lingkungan penting untuk dibangun di dalam Bank. Oleh karena itu, Bank berkomitmen untuk melakukan pemantauan dan pemeliharaan data lingkungan di Kantor pada tahun 2024.

Dalam hal operasi ramah lingkungan, sosialisasi telah dilaksanakan di lingkungan kantor pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari budaya perusahaan terkait dengan peduli lingkungan.

1. Efisiensi Penggunaan ATK (Alat Tulis Kantor)

   Kertas merupakan kebutuhan penting dalam operasional Bank. Kertas antara lain dipakai untuk administrasi perkantoran, seperti surat-menyurat, memo, mencetak berbagai laporan perusahaan, pendaftaran, dan pencetakan buku nasabah, pencatatan transaksi setoran, penarikan dan lain-lain. Bank menyadari bahwa bahan baku kertas adalah bubur kayu yang didapat dari penebangan kayu. Karena itu, Bank berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penghematan penggunaan kertas. Dengan penghematan kertas, maka Bank turut mengurangi dampak negatif bagi lingkungan, seperti penebangan pohon dan emisi gas rumah kaca. Tahun 2024, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan kertas bekas (sisi sebaliknya) untuk mencetak draft surat/memo. Ke depan dengan adanya penerapan digitalisasi pelaporan yang dicanangkan oleh OJK melalui POJK No. 23 Tahun 2024 yang menggeser semua laporan luring (offline) menjadi daring (online) membantu Industri BPR untuk mengurangi penggunaan kertas (paperless).

2. Efisiensi Penggunaan Listrik

   Listrik digunakan untuk penerangan, penggerak sarana- prasarana kantor seperti mesin fotokopi, AC, Komputer dan sebagainya. Bank menyadari bahwa sebagian besar listrik yang dipakai saat ini bersumber dari PLTU, yang menggunakan batu bara sebagai sumber pembangkit, yang termasuk sumber energi tak terbarukan. Oleh karena ketersediaan listrik semakin terbatas, Bank berupaya untuk melakukan efisiensi sehingga tidak terjadi pemborosan energi. Adapun program pengelolaan energi yang dilakukan. Berdasarkan tabel diatas terlihat pemakaian listrik selama tiga tahun terakhir di Bank Kantor mengalami penurunan, sehingga program hemat energi yang dicanangkan Bank dapat terlaksana dengan baik.

3. Efisiensi Penggunaan Air

   Penggunaan Air dilakukan penghematan dengan melakukan pengecekan terhadap pemenuhan air dalam yang terdapat di wadah air dengan memastikan penggunaan air dipakai sesuai dengan kebutuhan kantor termasuk pelayanan kepada konsumen.

4. Efisiensi Penggunaan BBM (Bahan Bakar Minyak)

   BBM dipakai juga untuk kendaraan operasional kantor. Sementara itu, selain dipakai untuk menggerakkan genset, BBM dipakai juga untuk kendaraan operasional kantor. Kategori yang sama berlaku untuk jenis BBM yang digunakan Bank, yaitu bensin dan solar. Berdasarkan tabel diatas terlihat pemakaian BBM selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan dikarenakan sebelumnya kendaraan roda 4 yang digunakan sebanyak 3 menjadi 2 kendaraan.

Aspek Sosial

Tabel Ikhtisar Kinerja Aspek Sosial

Nominal uang dalam satuan rupiah penuh

Keterangan	2024	2023	2022
Dana Sosial Yang Disalurkan	0	0	0

Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) haruslah senantiasa ditanamkan kepada seluruh pegawai agar dapat menjadi budaya yang mampu mendukung keberlanjutan operasional Bank. K3 merupakah aspek penting yang wajib diterapkan di seluruh kegiatan operasi, dalam bekerja dengan sesama pegawai, melayani nasabah, bahkan berinteraksi dengan keluarga maupun orang lain.

Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat berkontribusi untuk mendukung iklim kerja yang kondusif sehingga mampu meningkatkan produktivitas. Guna memastikan hal ini, peran pegawai sangatlah penting. Oleh karena itu Bank melibatkan pegawai dalam strategi dan kebijakan terkait K3, diantaranya mencakup:

1. Memastikan fasilitas kantor dalam kondisi sangat baik
2. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman mengenai budaya K3
3. Meningkatkan peran dan fungsi semua sektor dalam pelaksanaan K3

3. Profil Bank

Informasi Umum Perusahaan	
Nama Perusahaan	PT BPR DEPO MITRA MANDIRI
Alamat	Komplek Ruko Cibubur Times Square B1 No 6-8, Jl. Transyogi Rt.001/010, Jatikarya, Jatisampurna, Bekasi 17435
Nomor Telepon	(021) 2281 7575
Email	bpr.depomitramandiri@yahoo.co.id
Website	www.bprdepomitramandiri.co.id

Adapun Visi dan Misi PT BPR Depo Mitra Mandiri sebagai berikut :

a. Visi

Menjadi perusahaan unggul, menghasilkan laba dan tumbuh secara berkelanjutan

b. Misi

Menjadi tempat yang sehat untuk berkarya, berkehidupan dan mengembangkan profesionalisme bagi seluruh karyawan

Skala Usaha Bank :

a. Total Aset dan Kewajiban

Keterangan	2,024	2,023	2,022
Total Asset	108,257,919,350	93,706,693,180	82,966,819
Total Kewajiban	93,349,616,915	80,155,243,753	70,934,776

b. Jumlah Pegawai

Sepanjang tahun 2024 Bank memiliki SDM total 33 karyawan dengan demografi pegawai secara rinci menjadi lampiran dalam Laporan keberlanjutan ini.

Berdasarkan Level Organisasi

Dewan Komisaris	2	6.1%
Direksi	2	6.1%
Pejabat Eksekutif	9	27.3%
Pelaksana	20	60.6%
Jumlah	33	100.0%

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Magister	2	6.1%
Sarjana	15	45.5%
Diploma III	2	6.1%
SMA	14	42.4%
Jumlah	33	100.0%

Berdasarkan Status Kepegawaian

Tetap	24	72.7%
Kontrak	9	27.3%
Jumlah	33	100.0%

Berdasarkan Rentang Usia

Diatas 50 Tahun	6	18.2%
41 s/d 50 Tahun	5	15.2%
31 s/d 40 Tahun	5	15.2%
21 s/d 30 Tahun	15	45.5%
18 s/d 20 Tahun	2	6.1%
Jumlah	33	100.0%

Berdasarkan Generasi

Baby Boomers 1946 - 1965	1	3.0%
Generation X 1966 - 1980	10	30.3%
Generation Y 1981 - 1996	10	30.3%
Generation Z 1997 - 2012	12	36.4%
Jumlah	33	100.0%

Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki laki	12	36.4%
Perempuan	21	63.6%
Jumlah	33	100%

c. Persentasi Kepemilikan Saham

No.	Nama	saham	Nominal	Prosentase
1.	PT. Hajar Aswad Tani Indonesia	5,464	5,464,000,000	95%
2.	Fasika Khaerul Zaman	287	287,000,000	5%
	Total	5,751	5,751,000,000	100%

d. Wilayah Operasional

Kegiatan operasional BPR Depo Mitra Mandiri di dukung oleh 4 (empat) kantor yaitu Kantor Pusat dan 3 (tiga) Kantor Cabang yang berlokasi sebagai berikut :

i. **Kantor Pusat**

Komplek Ruko Cibubur Times Square B1 No. 6-8, Jl Transyogi Rt 001/010 Jatikarya, Jatisampurna, Bekasi

Telp. (021) 2281 7575

ii. Kantor Cabang Pondok Aren

Komplek Ruko Regia Blok RB – 1 No. 36 Jalan Graha Bintaro Utama Komplek Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Telp. (021) 7345 0840, Faks (021) 7345 0746

iii. **Kantor Cabang Cibinong**

Ruko Perum Cibinong Griya Asri Jl. KSR Dadi Kusmayadi Blok R3 No. 4 Kel. Tengah, Kec. Cibinong, Bogor.

Telp. (021) 8791 9767, Faks (021) 8791 9768

iv. Kantor Cabang Depok

Komplek Ruko Saladin Square B-27 , Jl Margonda Raya No. 39, Depok
Telp. (021) 752 2323, Fax. (021) 77202767

e. Produk

No	Jenis Produk	Deskripsi
1	Tabungan	Tabungan Depo Harian
		Tabungan Ku
		Tabungan Hajatan
		Tabungan Depo Arisan
2	Deposito	Deposito Berjangka 1 Bulan
		Deposito Berjangka 3 Bulan
		Deposito Berjangka 6 Bulan
		Deposito Berjangka 12 Bulan
3	Kredit	Kredit Guna Mandiri
		Kredit Guna Mandiri Karyawan
		Kredit Pensiun

Penghimpunan Dana

a. Tabungan Depo Harian

Tabungan dengan bunga menarik yang dihitung secara harian, penyetoran minimal Rp. 50.000, penarikan tabungan dapat dilaksanakan setiap saat pada jam kerja serta tabungan dijamin Pemerintah (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS). Dengan suku bunga 4,75 % per tahun

b. **TabunganKu**

TabunganKu adalah rekening tabungan yang diwajibkan Bank Indonesia dengan suku bunga 2% dan tabungan tersebut diwajibkan untuk nasabah yang melakukan akad kredit. Dengan suku bunga 2,00 % per tahun

c. **Tabungan Hajatan**

Tabungan Depo Hajatan untuk mewujudkan rencana tertentu (hajatan) dikemudian hari seperti Tabungan Pendidikan, Tabungan Sunatan, Pernikahan, Hari Raya, Tabungan untuk liburan. Tabungan hanya dapat diambil pada saat jatoh tempo, sehingga dana akan tersedia pada saat dibutuhkan, dijamin Pemerintah (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS). Dengan suku bunga 5,75 % per tahun

d. **Tabungan Arisan**

Tabungan Arisan adalah produk lanjutan tabungan depo, dimana tabungan tersebut diundi untuk mendapatkan bonus pada setiap bulan dan hadiah menarik diperiode terakhir.

e. **Deposito Berjangka**

Deposito adalah simpanan yang penarikanya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Setoran minimum deposito adalah Rp. 1.000.000,-

Produk Kredit

a. **Kredit Guna Mandiri**

Kredit Guna Mandiri adalah penyedia dana kepada debitur dengan tujuan modal kerja, investasi dan konsumtif dengan agunan SHM/SHGB, Deposito dan BPKB Motor/Mobil

b. **Kredit Guna Mandiri Karyawan**

Kredit Guna Mandiri Karyawan adalah penyedia dana bagi karyawan perusahaan yang dipergunakan untuk investasi, modal kerja maupun konsumtif dengan sistem pembayaran melalui pemotongan gaji oleh pihak perusahaan, koperasi atau dibayarkan langsung oleh karyawan yang bersangkutan

c. **Kredit Pensiun**

Kredit Pensiun adalah penyedia dana bagi pensiunan dalam hal ini bekerjasama dengan mitra pembiayaan yaitu koperasi

Layanan

SDB (Safe Deposit Box)

Merupakan layanan penitipan barang yang disediakan oleh bank kepada nasabah berupa laci dengan penutupan yang dapat dikunci yang diperuntukan bagi nasabah tanpa bank mengetahui rincian atas barang yang disimpan dalam laci tersebut.

Keanggotaan Pada Asosiasi Regional hingga Nasional

Menjadi anggota Perbarindo (Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat)

Penjelasan Lainnya

BPR DEPO MITRA MANDIRI mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

4. Penjelasan Direksi

Kebijakan Untuk Merespon Tantangan Dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

Bank berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai keberlanjutan dengan menjadi Bank yang terpercaya dan unggul dalam memberikan kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Nilai keberlanjutan tersebut diimplementasikan melalui strategi utama dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang selaras dengan kebutuhan strategis, integrasi aspek sosial dan lingkungan hidup ke dalam pengelolaan risiko, serta peningkatan pertumbuhan portofolio kredit atau pembiayaan pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan, khususnya sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Sektor UMKM merupakan usaha produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu, dan memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia khususnya menyerap tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Sebagai upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), BPR menetapkan RAKB dengan rencana 5 (lima) tahun sebagai Rencana Aksi dalam Jangka Panjang. Selain itu, Bank juga memiliki Rencana Aksi dalam Jangka Pendek (satu tahun) yang ditetapkan di tahun 2024. Target yang ditetapkan oleh Bank yaitu pegawai telah mengikuti sosialisasi Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan menerapakan operasional perbankan hijau.

Laporan Keberlanjutan ini berisi komitmen, strategi dan kinerja pencapaian kami terkait Keuangan Berkelanjutan. Adapun komitmen kami adalah:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian bank *(prudential banking)* dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha terutama dalam pemberian kredit.
2. Menjalankan operasional perusahaan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
3. Pengembangan kompetensi staf pada pemahaman terhadap sosial dan lingkungan hidup serta penerapannya dalam setiap kegiatan usaha bank.
4. Menerapkan perbankan yang inklusif dengan menyediakan dukungan akses keuangan bagi segenap masyarakat .
5. Berpartisipasi dalam upaya bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Strategi Pencapaian Target

Bank senantiasa meningkatkan strategi-strategi keberlanjutan khususnya dalam memitigasi risiko yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan usaha Bank. Dalam penerapan keuangan berkelanjutan, BPR tidak terlepas dari berbagai risiko di antaranya risiko pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun, risiko tersebut telah dikelola secara optimal oleh Bank dengan berbagai upaya mitigasi yang dilakukan. Tantangan utama saat ini di awal peletakan pondasi batu pertama keuangan berkelanjutan adalah komunikasi dan membuat para pemangku kepentingan sadar akan pentingnya penerapan keuangan keberlanjutan dalam operasional dan bisnis perusahaan. Namun demikian, kami sangat percaya bahwa ke depannya terdapat peluang penyaluran dana yang besar terkait dengan Keuangan Berkelanjtuan.

Selama tahun 2024, PT. BPR Depo Mitra Mandiri belajar untuk menjadi lebih baik dalam layanan keuangan berkelanjutan. Kami berharap adanya kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah, regulator dan asosiasi untuk menciptakan nilai tambah bagi ekonomi, lingkungan dan sosial dalam upaya mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

PT. BPR Depo Mitra Mandiri kedepannya akan terus menargetkan implementasi keuangan berkelanjutan, antara lain peningkatan pengetahuan semua jenjang organisasi mengenai keuangan berkelanjutan, menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada lingkungan dan sosial dalam operasional keseharian, mengembangkan produk keuangan berkelanjutan dan pada akhirnya meningkatkan portofolio produk keuangan berkelanjutan.

Dalam merealisasikan keuangan berkelanjutan, perlu adanya harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan serta permasalahan lingkungan lainnya yang menjadi tanggung jawab kita semua. Kami berpartisipasi memberikan konstribusi dalam mengurangi dampak negatif lingkungan dan sosial dari dampak yang ditimbulkan dari kegiatan operasional dan bisnis kami.

Apresiasi

BPR memberikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah bersama- sama berkontribusi dalam penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan di PT. BPR Depo Mitra Mandiri. Dukungan dan rasa percaya yang diberikan kepada kami, menjadi kekuatan kami untuk mampu memberikan dan menciptakan nilai keberlanjutan bagi semua pihak. Harapan kami adalah seluruh pemangku kepentingan dapat terus memberikan dukungan serta kerja samanya agar kami mampu tumbuh secara berkelanjutan dan kerjasama yang baik dalam mengelola isu-isu keberlanjutan.

5. Tata Kelola Berkelanjutan

Struktur Tata Kelola Keberlanjutan

Tata Kelola yang Baik (GCG - *Good Corporate Governance*) bagi Bank merupakan suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan 5 (lima) Pilar Tata Kelola, yaitu keterbukaan *(transparency)*, akuntabilitas *(accountability)*, pertanggung jawaban *(responsibility)*, independensi *(independency)*, dan kewajaran (*fairness)*. Selain itu, GCG merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang- undangan dan etika perbakan.

Struktur tata kelola perusahaan yang baik, adalah sebagai berikut:

1. RUPS, adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/ atau Anggaran dasar.
2. Dewan Komisaris, adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan Anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Direksi, adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar.

Dalam penerapan *good corporate governance*, Perseroan telah memiliki kerangka kerja (*frame work)* yang menggabungkan tiga hal yaitu Struktur Tata Kelola (*Governance Structure)*, Proses Tata Kelola (*Governance Process)* dan Hasil Tata Kelola *(Governance Outcome)*. Kerangka kerja dan operasional ini diharapkan mampu memberikan hasil berupa perwujudan ekspektasi para pemangku kepentingan *(stakeholders)* secara berkesinambungan.

1. Dewan Komisaris

   Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan mengacu kepada anggaran dasar Bank serta peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain sebagai berikut:

   a. Memberikan persetujuan atas Kebijakan Keuangan Berkelanjutan yang merupakan salah satu kebijakan spesifik Bank.
   b. Memberikan persetujuan terhadap RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan)
   c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Keberlanjutan *(Sustainability Report)*
   d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.

2. Direksi

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi terkait dengan penerapan program Keuangan Berkelanjutan mengacu kepada anggaran dasar Bank serta peraturan perundang- undangan lainnya, antara lain sebagai berikut:

a. Menyusun dan mengusulkan rancangan kebijakan Keuangan Berkelanjutan berikut perubahannya kepada Dewan Komisaris.
b. Menyusun dan mengusulkan RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) kepada Dewan Komisaris.
c. Menyusun dan mengusulkan Laporan Keberlanjutan *(Sustainability Report)* kepada Dewan Komisaris.
d. Mengkomunikasikan RAKB kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank.
e. Memantau satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Keuangan berkelanjutan.

Sebagai BPR (Bank Perekonomian Rakyat) yang memiliki modal inti di bawah Rp 50 milyar, PT. BPR Depo Mitra Mandiri berkomitmen untuk menerapkan keuangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

Penerapan keuangan berkelanjutan di PT. BPR Depo Mitra Mandiri secara umum menjadi tanggung jawab Direktur Utama sebagai pemimpin tertinggi di PT. BPR Depo Mitra Mandiri. Namun, dalam pelaksanaannya, Direktur Utama telah menugaskan Direktur Yang Membawahkan Fungsi (YMF) Kepatuhan yang membawahi Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai koordinator Tim Implementasi Keuangan Berkelanjutan yang bertugas melakukan penyusunan, monitoring, dan penyampaian atas penerapan keuangan berkelanjutan.

Dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan penyampaian hasil pelaksanaan atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dalam bentuk Laporan Berkelanjutan dilakukan oleh Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko sebagai Koordinator Tim Khusus Keuangan Berkelanjutan.

Dengan adanya Keuangan Berkelanjutan diharapkan dapat melalukan tugas adalah sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa Keuangan Berkelanjutan dan Unit Kerja Pengelola telah melaksanakan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bersama-sama merekomendasikan hasil penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan hasil pemantauan Keuangan Berkelanjutan;

3. Melakukan koordinasi terkait Keuangan Berkelanjutan serta Unit Kerja terkait hal-hal sebagai berikut: (a) Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB); (b) Pemantauan penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan (c) Penyusunan Laporan Berkelanjutan;
4. Menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tugas dan tanggung jawab untuk mendapat persetujuan;
5. Menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Berkelanjutan sebelum batas akhir penyampaian sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pengembangan Kompetensi Keuangan Berkelanjutan

Pembekalan dilakukan melalui pemberian pelatihan yang rencana akan dilakukan pada bulan Oktober tahun 2025 kepada seluruh karyawan. Materi yang disampaikan mencakup prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dan kategori kegiatan yang tergolong sebagai KUB. Dengan demikian, Bank berharap dapat mengembangkan portofolio produk yang termasuk dalam kategori KUB di masa mendatang.

Identifikasi Risiko Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Bank berupaya untuk mengintegrasikan pengelolaan risiko terkait aspek lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko Bank, melalui penyusunan kebijakan perkreditan maupun prosedur terkait portofolio produk yang termasuk dalam Kategori Usaha Berkelanjutan (KUB). Kebijakan dan prosedur tersebut telah menjadi bagian dari rencana strategis keuangan berkelanjutan Bank yang ditargetkan dapat tersedia pada tahun 2024.

Untuk memastikan setiap program dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, Bank akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Bank mengidentifikasi pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan pengaruh dan dampaknya terkait keuangan berkelanjutan.

Peluang dan Tantangan Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Kesadaran mengenai prinsip keuangan berkelanjutan telah menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi dalam implementasi dan praktiknya selama tahun 2024 sehingga diperlukan ditingkatkan konsistensi pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Di sisi lain, Bank mengidentifikasi adanya peluang dalam pembiayaan berkelanjutan terutama untuk melayani segmen ritel dan UMKM untuk mendorong akselerasi usaha berwawasan lingkungan di masyarakat.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama penerapan keuangan berkelanjutan di PT. BPR

Depo Mitra Mandiri. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Bank, antara lain sebagai berikut:

1. Kesadaran karyawan PT. BPR Depo Mitra Mandiri di tahun 2024 pertama sekali menerapkan keuangan berkelanjutan masih fokus pada pengembangan pengetahuan dan kesadaran penerapan keuangan berkelanjutan kepada seluruh pegawai.
2. Penerapan keuangan berkelanjutan juga membutuhkan kerja sama dan dukungan penuh dari Pemerintah setempat, pelaku bisnis dan masyarakat
3. Kesadaran nasabah dan pemangku kepentingan juga diperlukan untuk mendukung dan menerapkan keuangan berkelanjutan. Pengembangan organisasi, produk dan kebijakan internal yang perlu disusun dan dikembangkan memerlukan waktu dan pengetahuan yang cukup terkait Keuangan Berkelanjutan.

6. Kinerja Keberlanjutan

6.1 Kinerja Ekonomi

Tabel Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi

Nominal uang dalam ribuan rupiah

Keterangan	2024	2023	2022
			Kinerja Keuangan (Dalam Jutaan Rupiah)
Total Aset	108.257.919	93.706.693	82.966.819
Aset Produktif	0	0	0
Kredit/Pembiayaan Bank	71.890.751	61.267.651	47.704.664
Dana Pihak Ketiga	91.975.342	79.123.930	69.890.907
Pendapatan Operasional	19.055.466	13.170.726	10.533.282
Beban Operasional	16.116.885	10.998.396	8.108.080
Laba Bersih	2.473.153	2.012.565	1.972.631
			Rasio Kinerja (Dalam %)
Rasio Kecukupan Modal Minimum (KPMM)	39,52	16,89	19,84
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	3,48	2,12	1,37
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	100,00	100,00	100,00
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap aset produktif	0,00	0,00	0,00
NPL gross	5,40	3,85	3,06
NPL nett	3,88	2,03	1,85
Return on Asset (ROA)	2,21	2,99	2,91
Return on Equity (ROE)	18,09	14,85	16,42
Net Interest Margin (NIM)	5,79	9,84	10,33
Rasio Efisiensi (BOPO)	84,54	83,54	77,95
Loan to Deposit Ratio (LDR)	109,82	107,82	67,63

Tabel Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Nominal uang dalam ribuan rupiah

Keterangan	2024	2023	2022
Jumlah produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha berkelanjutan			
Penghimpunan Dana (Rp)	0,00	0,00	0,00
Penyaluran Dana (Rp)	0,00	0,00	0,00
Total Aset Produktif Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Rp)	0,00	0,00	0,00
Total Kredit/Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Rp)	0,00	0,00	0,00
Total Non-Kredit/Pembiayaan Non-Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Rp)	0,00	0,00	0,00
Persentase total kredit/pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total kredit/pembiayaan (%)	0,00	0,00	0,00

6.2 Kinerja Sosial

Komitmen Perusahaan

PT. BPR Depo Mitra Mandiri memberikan layanan merata kepada seluruh nasabah tanpa memandang kelas pendapatan masyarakat.

a. Kinerja Sosial Terhadap Ketenagakerjaan

   BPR memperhatikan tingkat kesejahteraan pegawai dengan memberikan pengupahan/ penggajian sesuai dengan standar UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) di wilayah kerja masing-masing karyawan.

b. Kinerja Sosial Terhadap Masyarakat

   PT. BPR Depo Mitra Mandiri ikut berkontribusi santunan kepada wilayah kerja sekit

6.3 Kinerja Lingkungan Hidup

1. Kegiatan Internal

PT BPR Depo Mitra Mandiri mewujudkan operasional bank ramah lingkungan dengan menerapkan berbagai kebijakan sesuai prinsip 3R (***Reduce, Reuse end Recycle)***. Sosialisasi atas prinsip- prinsip ini terus dilakukan agar tujuan awal yang ditetapkan Perusahaan tercapai. Operasional kantor yang ramah lingkungan diwujudkan melalui pengelolaan bahan baku/ material, energi, dan air agar semua bisa lebih efisien. Dengan upaya itu, maka selama tahun pelaporan, operasional PT BPR Depo Mitra Mandiri tidak membawa dampak buruk bagi keanekaragaman hayati di Indonesia.

2. Dukungan Pada Kelestarian Lingkungan Hidup Bagi Bank

Perusahaan juga menerapkan penggunaan bahan- bahan yang ramah lingkungan termasuk mengganti penggunaan gelas plastik dengan tumbler yang disiapkan pegawai masing-masing.

Tabel Uraian Penggunaan Energi

Nominal uang dalam satuan rupiah penuh

Keterangan	Penggunaan Pada Tahun Laporan
Listrik (Rp)	70.688.721,00
Volume Air dari PDAM (Rp)	2.916.600,00
Penggunaan BBM (Rp)	42.319.534,00

6.4 Tanggung Jawab Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

1. Inovasi dan Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

Sebagai entitas bisnis, PT BPR Depo Mitra Mandiri senantiasa berupaya agar eksistensinya semakin maju dan berkembang. Salah satunya adalah dengan melakukan inovasi dan pengembangan produk dan layanan dengan memperhatikan perkembangan teknologi terkini yang sangat pesat sebagai faktor pendorong pergeseran perilaku masyarakat modern yang menginginkan kemudahan, rasa aman dan kenyamanan dalam bertransaksi perbankan.

Dalam melakukan inovasi, PT BPR Depo Mitra Mandiri melakukannya dengan prinsip

kehati- hatian sesuai dengan kebijakan perusahaan. Adapun inovasi dan pengembangan produk/ jasa yang dilakukan PT BPR Depo Mitra Mandiri selama tahun 2024 antara lain meluncurkan Layanan Safe Deposit Box, Kredit kepada pensiun dan tabungan Arisan.

Selain itu, Perusahaan juga mengembangkan program kredit Scoring, program Pembuatan Aplikasi Monitoring Kredit, dan Pengembangan Web Based Laporan Tahunan bekerja sama dengan Vendor.

2. Jumlah dan Persentase Produk dan Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya Bagi Pelanggan.

   Semua produk dan jasa yang ditawarkan PT BPR Depo Mitra Mandiri telah memenuhi semua persyaratan dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga telah teruji keamanannya bagi nasabah. Selaras dengan itu, untuk menekan risiko kerugian seminimal mungkin atas produk dan jasa tersebut, Perseroan secara kontinu menyampaikan informasi atas semua risiko yang mungkin terjadi kepada nasabah, seperti risiko pasar dan risiko fluktuasi mata uang. Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai saluran, formulir Ringkasan Informasi Produk dan layanan (RIPLAY) maupun secara tatap muka.

   Sejalan dengan itu, sesuai regulasi yang ada, PT BPR Depo Mitra Mandiri juga melakukan kegiatan literasi keuangan dan inklusi keuangan secara berkala sehingga calon nasabah atau nasabah mendapatkan pemahaman yang benar tentang produk/ jasa yang ditawarkan Perseroan. Dengan demikian, mereka akan melakukan investasi sesuai kebutuhan dan telah mengetahui profil risiko yang melekat di dalam produk/jasa tersebut.

3. Dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan

   PT BPR Depo Mitra Mandiri telah melakukan penilaian terhadap setiap produk/ jasa yang ditawarkan kepada nasabah. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan dan mengacu pada Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) dalam POJK Keuangan Berkelanjutan, maka PT BPR Depo Mitra Mandiri akan memberikan dana dengan memegang prinsip kehati- hatian, termasuk mencegah risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul. Upaya itu membawa hasil dengan tidak adanya dampak negatif atas produk dan jasa yang dikeluarkan PT BPR Depo Mitra Mandiri pada tahun pelaporan.

4. Jumlah Produk yang Ditarik Kembali dan Alasannya

   Tidak ada produk yang ditarik atas pertimbangan internal PT BPR Depo Mitra Mandiri maupun perintah dari regulator (OJK).

5. Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan

PT BPR Depo Mitra Mandiri belum melakukan survey terhadap kepuasan pelanggan terhadap produk dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan, namun di sepanjang tahun 2024 tidak ada komplain dari nasabah atau masyarakat terhadap produk dan jasa Bank yang merusak lingkungan hidup dan menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

7. Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen

Tidak Terdapat Laporan atas Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen.

8. Umpan Balik

Lembar Umpan Balik untuk Pembaca

Untuk terwujudnya komunikasi dua arah sekaligus penerapan evaluasi PT BPR Depo Mitra Mandiri yang bertujuan meningkatkan kualitas Laporan di masa mendatang, PT BPR Depo Mitra Mandiri menyediakan Lembaran Umpan Balik di bagian akhir Laporan Keberlanjutan ini. Dengan lembaran tersebut, diharapkan pembaca dan pengguna laporan ini dapat memberikan usulan, umpan balik, opini dan sebagainya, yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas pelaporan di masa depan.

PT BPR Depo Mitra Mandiri memberikan akses informasi seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan, dan investor serta siapa saja yang memberikan umpan balik *(feedback)* mengenai laporan keberlanjutan ini dengan menghubungi:

Sdri. Chorry Tiarasari

Kepala Penunjang Operasional

PT BPR Depo Mitra Mandiri

Alamat : Komplek Ruko Cibubur Times Square B1 No 6-8, Jl. Transyogi Rt.001/010, Jatikarya, Jatisampurna, Bekasi 17435
Tlp : (021) 2281 7575
Email : bpr.depomitramandiri@yahoo.co.id
Website : www.bprdepomitramandiri.co.id

Tanggapan Bank terhadap Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya

Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 Milyar penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2024 ini merupakan yang pertama kali oleh karenanya belum mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan. Bank akan terus melakukan perbaikan agar dapat memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat bagi segenap pembaca

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
DEPO MITRA MANDIRI
maju bersama

LAPORAN DEMOGRAFI PEGAWAI PT BPR DEPO MITRA MANDIRI TAHUN 2024

1. Demografi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Dewan Komisaris	2	6.1%
2	Direksi	2	6.1%
3	Pejabat Eksekutif	9	27.3%
4	Pelaksana	20	60.6%
	Jumlah	33	100.0%

2. Demografi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Magister	2	6.1%
2	Sarjana	15	45.5%
3	Diploma III	2	6.1%
4	SMA	14	42.4%
	Jumlah	33	100.0%

3. Demografi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Tetap	24	72.7%
2	Kontrak	9	27.3%
	Jumlah	33	100.0%

4. Demografi Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Diatas 50 Tahun	6	18.2%
2	41 s/d 50 Tahun	5	15.2%
3	31 s/d 40 Tahun	5	15.2%
4	21 s/d 30 Tahun	15	45.5%
5	18 s/d 20 Tahun	2	6.1%
	Jumlah	33	100.0%

5. Demografi Pegawai Berdasarkan Generasi

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Baby Boomers 1946 - 1965	1	3.0%
2	Generation X 1966 - 1980	10	30.3%
3	Generation Y 1981 - 1996	10	30.3%
4	Generation Z 1997 - 2012	12	36.4%
	Jumlah	33	100.0%

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
DEPO MITRA MANDIRI
maju bersama

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Nama BPR : PT. BPR Depo Mitra Mandiri

Posisi Laporan : 2024

Sesuai POJK nomor 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, dengan ini Direksi PT. BPR Depo Mitra Mandiri menyatakan bahwa:

1. Direksi bertanggung jawab dalam penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, antara lain:
   a. Penyusunan dan penyajian Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan.
   b. Kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan.
   c. Kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Keuangan.
   d. Penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.

   Untuk itu telah ditunjuk seorang penanggung jawab pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan BPR tahun 2024 adalah benar dan telah diaudit oleh Akuntan Publik Drs. Arifin Faqih Ak, CPA dari Kantor Akuntan Publik BHARATA ARIFIN MUMAJAD
3. Seluruh informasi yang disampaikan dalam laporan tahunan 2024 adalah benar dan sesuai dengan kondisi BPR yang sebenarnya.
4. Pengendalian yang dilakukan adalah memastikan laporan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu. Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaporan keuangan melakukan validasi data dan informasi yang disajikan adalah benar dan sesuai dengan kondisi BPR yang sebenarnya.
5. Pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan dinilai cukup efektif dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Bekasi, 30 April 2025

PT. BPR DEPO MITRA MANDIRI



Teti Ofianti	Meulya Putri
Direktur Utama	**Direktur**

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
DEPO MITRA MANDIRI

LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024
Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023
Dan
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

Halaman

Cover

Daftar Isi

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen i

Neraca 1

Laporan Laba Rugi..... 2

Laporan Perubahan Ekuitas..... 3

Laporan Arus Kas..... 4

Catatan atas Laporan Keuangan 5

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
BHARATA, ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS, TAX & MANAGEMENT CONSULTANTS
NIUKAP NO 311.KM.1/2012 TGL 16-03-2012

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. : 00006/2.0899/AU.2/07/0033-4/1/I/2025

Kepada Yth,
Direksi dan Komisaris
PT . BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
DEPO MITRA MANDIRI

Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DEPO MITRA MANDIRI** ("Perusahaan"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Basis Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.
Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
BHARATA ARIFIN MUMAJAD & SAYUTI

KANTOR AKUNTAN PUBLIK BAMS CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

00006

Drs. Arifin Faqih, Ak., CPA
NRAP : 0033

Jakarta, 15 Januari 2025

PT BPR DEPO MITRA MANDIRI
NERACA
31 DESEMBER 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023

	Catatan	2024	2023
ASET			
Aset Lancar			
Kas	3	54.527.700	22.616.100
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	4	855.134.832	894.800.035
Penempatan pada Bank Lain	5	33.973.294.768	30.273.697.770
Dikurangi : Penyisihan Kerugian	2c	(1.500.000)	(16.097.341)
Jumlah		33.971.794.768	30.257.600.429
Kredit yang diberikan	6	71.890.750.510	61.267.650.993
Dikurangi : Penyisihan Kerugian	2c	(1.320.432.018)	(1.500.769.822)
Jumlah		70.570.318.492	59.766.881.171
Aset Tetap dan Inventaris	7	2.975.344.594	2.934.844.694
Akumulasi Penyusutan		(1.159.519.113)	(848.021.116)
		1.815.825.481	2.086.823.578
Aset Tidak Berwujud	8	241.051.500	202.201.500
Akumulasi Amortisasi		(206.017.096)	(202.201.471)
		35.034.404	29
Aset Lain-lain	9	955.283.673	677.971.838
JUMLAH ASET		**108.257.919.350**	**93.706.693.180**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban			
Kewajiban Segera	10	152.963.656	173.670.843
Utang Bunga	11	527.999.645	238.698.037
Utang Pajak	12	55.310.568	186.297.038
Simpanan :	13		
a. Tabungan		6.171.548.444	5.583.377.369
b. Deposito		59.936.493.992	51.941.552.598
Simpanan dari Bank Lain	14	19.700.000.000	21.400.000.000
Pinjaman Diterima	15	6.167.299.995	198.999.962
Kewajiban Imbalan Kerja	16	225.786.100	66.964.500
Kewajiban Lain-lain	17	412.214.513	365.683.403
Jumlah Kewajiban		93.349.616.914	80.155.243.751
Ekuitas			
Modal saham 14.000 lembar @ Rp 1.000.000 ditempatkan dan disetor penuh 5.751 lembar saham untuk tahun 2024 dan 5.170 lembar saham untuk tahun 2023	18	5.751.000.000	5.170.000.000
b. Modal Sumbangan		-	-
c. Selisih penilaian kembali aktiva tetap		-	-
Saldo Laba :			
- Cadangan Umum		1.144.300.000	1.039.000.000
- Laba Tahun Lalu		5.539.849.429	5.329.884.847
- Laba Tahun Berjalan		2.473.153.008	2.012.564.580
Jumlah Ekuitas		14.908.302.437	13.551.449.427
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**108.257.919.350**	**93.706.693.180**

Teti Ofianti, SE
Direktur Utama

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR DEPO MITRA MANDIRI

LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga	19		
Bunga Kontraktual		17.402.707.074	11.586.543.898
Provisi		992.798.129	1.010.511.765
		18.395.505.203	12.597.055.662
Beban Bunga	20		
Bunga Kontraktual		9.384.112.075	4.408.959.357
Beban Provisi dan Administrasi		32.055.787	35.010.367
		9.416.167.862	4.443.969.724
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		8.979.337.342	8.153.085.938
Pendapatan Operasional Lainnya	21	641.940.151	602.814.503
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		**9.621.277.492**	**8.755.900.441**
BEBAN OPERASIONAL	22		
Beban Penyisihan Kerugian		-	643.302.054
Beban Pemasaran		436.623.387	466.478.615
Beban Administrasi dan Umum		6.060.266.071	5.293.552.675
Beban Operasional Lain		185.807.098	180.236.309
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		**6.682.696.556**	**6.583.569.653**
LABA (RUGI) OPERASIONAL		**2.938.580.936**	**2.172.330.788**
PENDAPATAN / (BEBAN) NON OPERASIONAL	23		
Pendapatan Non Operasional		215.447.929	380.479.838
Beban Non Operasional		(47.377.207)	(38.740.671)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		**168.070.721**	**341.739.167**
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**3.106.651.657**	**2.514.069.955**
Taksiran Pajak Penghasilan	12	633.498.649	501.505.375
LABA (RUGI) BERSIH		**2.473.153.008**	**2.012.564.580**

Teti Ofianti, SE
Direktur Utama

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR DEPO MITRA MANDIRI

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024

Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2023

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Saham	Cadangan Umum	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Ekuitas tanggal 31 Desember 2022	**5.170.000.000**	**1.039.000.000**	**5.823.042.503**	**12.032.042.503**
Penambahan				
Laba Tahun 2023	-	-	2.012.564.580	2.012.564.580
Dividen, Tantiem & Jasa Produksi	-	-	(493.157.655)	(493.157.655)
Ekuitas tanggal 31 Desember 2023	**5.170.000.000**	**1.039.000.000**	**7.342.449.429**	**13.551.449.427**
Penambahan				
Setoran Modal dari Saldo Laba	581.000.000	-	-	581.000.000
Laba Tahun 2024	-	-	2.473.153.008	2.473.153.008
Penyisihan untuk cadangan umum	-	105.300.000	(105.300.000)	-
Dividen, Tantiem & Jasa Produksi	-	-	(1.697.300.000)	(1.697.300.000)
Ekuitas tanggal 31 Desember 2024	**5.751.000.000**	**1.144.300.000**	**8.013.002.437**	**14.908.302.437**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR DEPO MITRA MANDIRI

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Saldo Laba (Rugi)	2.473.153.008	2.012.564.580
Ditambah unsur yang tidak mempengaruhi arus kas operasi :		
Beban penyusutan aset tetap tahun berjalan	311.497.997	215.830.776
Beban Amortisasi tahun berjalan	3.815.625	-
Arus Kas Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	**2.788.466.630**	**2.228.395.356**
Perubahan Modal Kerja :		
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	39.665.203	(300.469.357)
Penempatan Pada Bank Lain	(3.714.194.339)	3.521.684.573
Kredit Yang Diberikan	(10.623.099.517)	(13.562.987.153)
Aset lain-lain	(277.311.835)	171.168.110
Penyisihan Kerugian Kredit	(180.337.804)	640.880.570
Agunan Yang Diambil alih		
Kewajiban Segera	(20.707.187)	43.883.907
Utang Bunga	289.301.608	68.772.267
Utang Pajak	(130.986.470)	97.061.245
Simpanan	8.583.112.469	7.740.612.332
Simpanan Dari Bank Lain	(1.700.000.000)	2.800.000.000
Kewajiban Imbalan Kerja	158.821.600	4.800.000
Kewajiban Lain lain	46.531.110	(227.071.199)
Arus Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas operasi	**(7.529.205.162)**	**998.335.295**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penambahan/pemindahan Aset Tetap	(40.499.900)	(1.434.885.950)
Penambahan/pemindahan aset tidak berwujud	(38.850.000)	-
Arus Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(79.349.900)**	**(1.434.885.950)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Deviden	(1.697.300.000)	(493.157.655)
Pinjaman Bank	5.968.300.033	(1.307.590.645)
Modal	581.000.000	
Arus Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	**4.852.000.033**	**(1.800.748.300)**
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	**31.911.600**	**(8.903.599)**
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun	**22.616.100**	**31.519.700**
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	**54.527.700**	**22.616.100**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1. **Umum**

PT Bank Perekonomian Rakyat Depo Mitra Mandiri yang selanjutnya disebut "Bank" adalah perseroan terbatas yang berkedudukan di Ruko Cibubur Times Square B1 No. 6-8, Jl Transyogi Rt.001 Rw. 010 Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat sesuai dengan Akta Notaris Isa Meilia, SH., M.Kn. No. 543 tanggal 26 Mei 2023 dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 0032376.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 12 Juni 2023. Bank didirikan tanggal 29 Maret 2005 berdasarkan Akta Notaris Titiek Soebekti, SH No. 2 dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-13263 HT.01.01.TH.2005 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tanggal 12 Juli 2005 Tambahan No. 7261.

Bank melakukan perubahan anggaran dasar sesuai dengan Akta Notaris Titiek Soebekti, SH No. 07 tanggal 12 Juni 2008 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-47454.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 4 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 30 tanggal 14 April 2009. Bank telah terdaftar dalam daftar perusahaan dengan No. TDP 10.27.1.64.01237 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok tanggal 08 Juli 2015.

Bank telah beberapa kali melakukan perubahan Anggaran Dasar, terakhir sesuai dengan Akta Notaris Isa Meilia, SH.,M.Kn No. 655, tanggal 31 Januari 2024. Akta ini telah diterima dan di catat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0036946 Tanggal 13 Februari 2024.

Bank telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Perekonomian Rakyat dari Bank Indonesia berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia mengenai izin usaha BPR dengan Surat Keputusan No. 7/39/KEP.GBI/2005 tanggal 11 Juli 2005.

Jumlah karyawan bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebanyak 33 orang dan 33 orang.

Maksud dan tujuan didirikan perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yaitu:

1 Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Deposito Berjangka, Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2 Memberikan Kredit.
3 Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan dan atau Giro pada Bank lain.

Susunan pengurus PT BPR Depo Mitra Mandiri berdasarkan Akta Notaris Isa Meilia, SH., M.Kn No. 818 Tanggal 30 November 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Fasika Khaerul Zaman, S.P., M.M
Komisaris	: Drs. Irianto, MBA

Direksi

Direktur Utama	: Teti Ofianti, SE
Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	: Meulya Putri, SE

Modal

Sesuai dengan Akta No. 655 tanggal 31 Januari 2024 oleh Notaris Isa Meilia, S.H.,M.Kn komposisi kepemilikan saham per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Komposisi Kepemilikan Saham

		31-Des-2024	
1. PT. Hajar Aswad Tani Indonesia	5.464	5.464.000.000	95%
2. Fasika Khaerul Zaman	287	287.000.000	5%
	5.751	5.751.000.000	100%

2. **Kebijakan Akuntansi**

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, standar akuntansi perbankan serta pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan otoritas perbankan Indonesia.

Mulai tahun 2010 kebijakan akuntansi bank berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sesuai SE No. 11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009 perihal Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Penerapan Pedoman Akuntansi BPR sesuai SE No. 12/14/DKBU tanggal 1 Juni 2010 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi BPR, peraturan-peraturan perpajakan. Prinsip-prinsip akuntansi penting yang telah diterapkan secara taat azas oleh Bank dalam penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a. **Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan ini disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan disusun berdasarkan prinsip berkesinambungan *(going concern)* serta mengikuti konvensi historis *(historical cost)*. Kebijakan akuntansi ini diterapkan secara konsisten kecuali apabila dinyatakan adanya perubahan dalam kebijakan akuntansi yang dianut.

b. **Transaksi Hubungan Istimewa**

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa seperti yang dinyatakan pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bab 28 tentang *Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.*

Transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terlepas dari harga yang dibebankan. Contoh-contoh berikut adalah transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang biasanya terjadi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada :

- Transaksi antara entitas dengan pemilik utamanya.
- Transaksi antara entitas dengan entitas lain di mana kedua entitas tersebut di bawah pengendalian bersama dari suatu entitas atau individu.
- Transaksi di mana entitas atau individu yang mengendalikan entitas pelapor menimbulkan beban secara langsung yang bukan ditanggung oleh entitas pelapor.

Jika terdapat transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka harus diungkapkan sifat dari hubungan tersebut, juga informasi yang diperlukan tentang transaksi dan saldonya untuk memahami dampak potensial hubungan tersebut terhadap laporan keuangan.

c. **Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif**

Aset produktif terdiri atas giro pada bank lain, penanaman dana bank dalam bentuk kredit, penempatan dana antar bank dan lembaga keuangan lainnya, termasuk komitmen dan kontinjensi pada transaksi administratif.

Bank membentuk penyisihan penghapusan aset produktif berdasarkan penelaahan terhadap kolektibilitas masing-masing aset produktif pada akhir tahun. Penentuan penyisihan penghapusan aset produktif mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat, masing-masing dengan tarif penyisihan penghapusan sebagai berikut :

Kolektibilitas	Persentase
- Lancar	0,5%
- Dalam Perhatian Khusus	3%
- Kurang Lancar	10%
- Diragukan	50%
- Macet	100%

2. **Kebijakan Akuntansi** (Lanjutan)

c. **Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif** (Lanjutan)

Penghapusan saldo aset produktif dibebankan atas masing-masing penyisihan penghapusan pada saat manajemen berpendapat bahwa aset tersebut harus dihapusbukukan karena sudah tidak dapat tertagih lagi. Penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai pendapatan non operasional periode berjalan.

Penggolongan aset produktif menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, mengacu kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif.

d. **Penempatan pada Bank Lain**

Penempatan pada bank lain berupa Giro, Tabungan dan Deposito disajikan sebesar saldo penempatan.

e. **Kredit Yang Diberikan**

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai "non performing" sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

f. **Aset Tetap dan Inventaris**

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus *(Straight line method)* selama masa manfaatnya yaitu :

Jenis Aset Tetap	Tahun	Tarif
- Bangunan	20	5,0%
- Peralatan Kantor	4	25,0%
- Kendaraan	8	12,5%

Beban pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan peningkatan daya guna dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi pada tahun yang bersangkutan.

g. **Kewajiban-kewajiban Yang Segera Dapat Dibayar**

Kewajiban-kewajiban yang segera dapat dibayar merupakan kewajiban bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Kewajiban segera dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank.

h. **Pengakuan Pendapatan dan Beban Operasional**

Pendapatan dan beban diakui dengan menggunakan metode akrual (*accrual basis*)

- Pendapatan bunga merupakan penanaman dana bank pada aset produktif, dimana pendapatan tersebut termasuk provisi dikurangi biaya-biaya
- Kredit yang termasuk kategori *performing* diakui secara akrual
- Kredit yang termasuk kategori *non performing* diakui secara kas
- Provisi diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus dan diakui sebagai penambah pendapatan bunga
- Biaya transaksi diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus dan diakui sebagai pengurang pendapatan bunga

Amortisasi provisi dan biaya transaksi dilakukan tanpa memperhatikan kredit termasuk *performing* atau *non performing*.

Bunga kredit yang sudah diakui belum dibayar dibatalkan, dan diakui sebagai tagihan kontinjensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian).

2. **Kebijakan Akuntansi** (Lanjutan)

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban Operasional (Lanjutan)

Penerimaan setoran debitur untuk kredit performing digunakan terlebih dahulu untuk melunasi tagihan bunga. Sedangkan penerimaan setoran dari debitur untuk kredit non-performing harus digunakan terlebih dahulu untuk melunasi tunggakan pokok yang telah jatuh tempo dan apabila masih terdapat kelebihan setoran yang diterima diakui sebagai pelunasan tunggakan bunga.

i. Kewajiban Imbalan Kerja

Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yan direvisi dan digantikan denan undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bank atau pengusaha mempunyai kewajiban memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti rugi kepada dan atau buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang besarnya telah diatur dalam Surat Keputusan tersebut.

Kewajiban imbalan kerja diakui pada saat pegawai telah memberikan jasanya kepada Bank dalam suatu periode, dan berkurang pada saat dibayarkan

Kewajiban imbalan kerja terdiri dari :
- Jangka pendek yang diakui sebesar jumlah tidak didiskonto (*undiscounted amount*)
- Jangka panjang yang diakui sebesar jumlah telah didiskonto (*discounted amount*)

Perusahaan tidak mempunyai rencana untuk melakukan pengurangan jumlah karyawan, maka manajemen berpendapat bahwa kebijakan yang mungkin timbul tidak akan mempengaruhi secara signifikan terhadap posisi keuangan dan kegiatan operasional perusahaan pada saat ini.
Pengakuan beban karyawan sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab No. 23 tentang Imbalan Kerja telah diterapkan.

j. Pendapatan Provisi

Pendapatan Provisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit diakui sebagai pendapatan yang dibagi rata sesuai masa kredit.

k. Taksiran Pajak Penghasilan

Taksiran Pajak Penghasilan Badan dihitung dari laba kena pajak yaitu laba yang telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. **Kas**

Saldo kas tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 54.527.700,- dan Rp. 22.616.100,-.

4. **Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima**

	31-Des-2024	31-Des-2023
~ PBYAD – KYD – Non Bank	796.522.842	850.143.181
~ PBYAD – Bunga Deposito dari Bank Lain	58.611.990	44.656.854
Jumlah Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	**855.134.832**	**894.800.035**

5. **Penempatan Pada Bank Lain**

	31-Des-2024	31-Des-2023
a. Tabungan		
~ Bank Mandiri KCP Depok Timur 1570000662875	658.293.370	4.052.302.205
~ Bank Mandiri KCP Kartini 1570002565695	883.772.803	575.282.586
~ Bank Mandiri 1570004027000	36.810.414	307.947.826
~ Bank Mandiri 1570004015641	231.859.307	121.694.206
~ Bank Mandiri 1570003991925	8.436.390	162.241.291
~ Bank Jawa Barat – Banten	2.568.805	205.919.308
~ Bank Syariah Indonesia	-	914.544
~ Bank DKI	2.640.913	1.880.000
~ BPR Utomo Manunggal Sejahtera	-	391.504.379
~ BPR Lestari Bali	19.915.337	19.799.459
~ BPR Universal	1.928.946.180	-
~ BPR Lingga Sejahtera	1.915.843.400	-
Jumlah Tabungan	**5.689.086.919**	**5.839.485.804**
b. Giro Pada Bank Lain		
~ Bank Jawa Barat – Banten 9001	12.955.280	13.075.392
~ Bank Jawa Barat – Banten 1001	56.140.459	-
~ Bank Central Asia	112.968.830	1.121.483.984
~ Bank Negara Indonesia	30.107.911	322.434.067
~ Bank OKE Indonesia (Andara)	1.515.130.091	-
~ Giro Bank Permata 702249678	290.395.283	87.737.222
~ Giro Bank Permata 702249686	216.509.995	739.481.301
Jumlah Giro	**2.234.207.849**	**2.284.211.966**
c. Deposito		
~ BPR Bantoru Perintis	800.000.000	800.000.000
~ BPR Dana Berkah Lestari	1.500.000.000	1.000.000.000
~ Bank Jabar Banten	350.000.000	400.000.000
~ BPR Arta Pundi mekar	1.400.000.000	1.400.000.000
~ BPR Hariarta Sedana	-	2.000.000.000
~ BPR Rama Ganda	1.000.000.000	1.400.000.000
~ BPR Fidusia Civitas	-	1.000.000.000
~ BPR Tridharma Depok	-	500.000.000
~ BPR Citra Bersada Abadi	200.000.000	200.000.000
~ BPR Haneda Mitra Usaha	-	500.000.000
~ BPR Koperindo Jaya	2.000.000.000	2.000.000.000
~ BPR Nusantara Bona Pasogit 32	500.000.000	500.000.000
~ BPR Nusantara Bona Pasogit 11	2.000.000.000	2.000.000.000
~ BPR Prima Kredit Mandiri	-	750.000.000
~ BPR Ciledug Dhana Semesta	200.000.000	200.000.000
~ BPR Wingsati	2.300.000.000	1.300.000.000
Saldo Dilanjutkan	**12.250.000.000**	**15.950.000.000**

5. **Penempatan Pada Bank Lain (lanjutan)**

	31-Des-2024	31-Des-2023
Saldo Lanjutan	**12.250.000.000**	**15.950.000.000**
~ BPR Bintara Pratama Sejahtera	500.000.000	500.000.000
~ BPR Rasyid	500.000.000	500.000.000
~ BPR Niji	500.000.000	500.000.000
~ BPR Lingga Sejahtera	500.000.000	1.500.000.000
~ BPR Mahkota Artha Sejahtera	-	1.000.000.000
~ BPR Bumidhana	-	500.000.000
~ BPR Ulima Djumpa Marom	200.000.000	200.000.000
~ BPR Antar Guna	500.000.000	500.000.000
~ BPR Artha Kurnia Raharja	500.000.000	500.000.000
~ BPR Central Sejahtera	500.000.000	500.000.000
~ BPR Kredit Mandiri Indonesia	1.500.000.000	-
~ BPR Artha Bersama	1.500.000.000	-
~ BPR Karunia Kanaka	1.000.000.000	-
~ BPR Pinang Artha	1.000.000.000	-
~ BPR Luna Sinar Indonesia	1.000.000.000	-
~ BPRS Botani Bina Rahmah	500.000.000	-
~ BPR Dana Mandiri Bogor	200.000.000	-
~ BPR Handalan Danagraha	1.000.000.000	-
~ BPR Ceper	500.000.000	-
~ BPR Mitra Sejahtera Lestari	500.000.000	-
~ BPRS Artha Madani	200.000.000	-
~ BPR Indomitra Artha Pertiwi	200.000.000	-
~ BPR Artatama Sejahtera	500.000.000	-
~ BPR Nusantara Bona Pasogit 29	500.000.000	-
Jumlah Deposito	**26.050.000.000**	**22.150.000.000**
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain	33.973.294.768	30.273.697.770
d. Penyisihan Kerugian	(1.500.000)	(16.097.341)
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain	**33.971.794.768**	**30.257.600.429**

Manajemen bank berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penempatan pada bank lain adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya penempatan pada bank lain serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

6. **Kredit yang Diberikan**

	31-Des-2024	31-Des-2023
~ Kredit yang Diberikan - BD - Lancar	58.049.001.569	52.265.325.680
~ Kredit yang Diberikan - BD - DPK	10.624.706.919	7.371.348.773
~ Kredit yang Diberikan - BD - Kurang Lancar	286.968.461	611.263.148
~ Kredt yang Diberikan - BD - Diragukan	294.516.796	503.994.050
~ Kredit yang Diberikan - BD - Macet	3.341.930.365	1.274.203.842
~ Kredit yang Diberikan	72.597.124.110	62.026.135.493
~ Provisi Kredit dan Biaya Transaksi	(706.373.600)	(758.484.500)
Jumlah Kredit Yang Diberikan	71.890.750.510	61.267.650.993
~ PPAP Kredit yang Diberikan	(1.320.432.018)	(1.500.769.822)
Jumlah Kredit yang Diberikan	**70.570.318.492**	**59.766.881.171**

6. **Kredit yang Diberikan** (Lanjutan)

	2024		2023
Berdasarkan prosentase kolektibilitas:			
~ Lancar	58.049.001.569	79,96%	52.265.325.680
~ DPK	10.624.706.919	14,64%	7.371.348.773
~ Kurang Lancar	286.968.461	0,40%	611.263.148
~ Diragukan	294.516.796	0,41%	503.994.050
~ Macet	3.341.930.365	4,60%	1.274.203.842
Jumlah	72.597.124.110	100,00%	62.026.135.493

7. **Aset Tetap**

	2024			
	01 Januari 2024	**Penambahan**	**Pengurangan**	**31 Desember 2024**
Harga Perolehan				
Tanah	387.200.000	-	-	387.200.000
Bangunan	57.941.500	-	-	57.941.500
Peralatan BSP	1.994.328.194	40.499.900	-	2.034.828.094
Kendaraan BSP	495.375.000	-	-	495.375.000
Jumlah Harga Perolehan	**2.934.844.694**	40.499.900	-	**2.975.344.594**
Akumulasi Penyusutan				
Ak. Peny.Bangunan BSP	18.800.059	2.954.064	-	21.754.123
Ak. Peny.Peralatan BSP	540.117.918	248.318.933	-	788.436.851
Ak. Peny.Kendaraan BSP	289.103.139	60.225.000	-	349.328.139
Jumlah Akumulasi Penyusutan	**848.021.116**	**311.497.997**	-	**1.159.519.113**
Nilai Buku	**2.086.823.578**			**1.815.825.481**

	2023			
	01 Januari 2023	**Penambahan**	**Pengurangan**	**31 Desember 2023**
Harga Perolehan				
Tanah	387.200.000	-	-	387.200.000
Bangunan	57.941.500	-	-	57.941.500
Peralatan BSP	726.517.711	1.434.885.950	167.075.467	1.994.328.194
Kendaraan BSP	563.750.000	-	68.375.000	495.375.000
Jumlah Harga Perolehan	**1.735.409.211**	**1.434.885.950**	**235.450.467**	**2.934.844.694**
Akumulasi Penyusutan				
Ak. Peny.Bangunan BSP	15.845.995	2.954.064	-	18.800.059
Ak. Peny.Peralatan BSP	554.541.679	152.651.706	167.075.467	540.117.918
Ak. Peny.Kendaraan BSP	297.253.133	60.225.006	68.375.000	289.103.139
Jumlah Akumulasi Penyusutan	**867.640.807**	**215.830.776**	**235.450.467**	**848.021.116**
Nilai Buku	**867.768.404**			**2.086.823.578**

Catatan : BSP : Bukan Sewa Pembiayaan SP : Sewa Pembiayaan

8. Aset Tidak Berwujud

	2024			
	01 Januari 2024	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
Harga Perolehan				
- Program Aplikasi BSP	202.201.500	38.850.000,00	-	241.051.500
Jumlah	**241.051.500**	**38.850.000,00**	-	**241.051.500**
Akumulasi Penyusutan				
- Amortisasi Prog.Apl.BSP	202.201.471	3.815.625,00	-	206.017.096
Jumlah	**206.017.096**	**3.815.625,00**	-	**206.017.096**
Nilai Buku	**35.034.404**			**35.034.404**

	2023			
	01 Januari 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023
Harga Perolehan				
- Program Aplikasi BSP	202.201.500	-	-	202.201.500
Jumlah	**202.201.500**	-	-	**202.201.500**
Akumulasi Penyusutan				
- Amortisasi Prog.Apl.BSP	202.201.471	-	-	202.201.471
Jumlah	**202.201.471**	-	-	**202.201.471**
Nilai Buku	**29**			**29**

Catatan : BSP : Bukan Sewa Pembiayaan

9. Aset Lain-lain

	31-Des-2024	31-Des-2023
~ Beban Dibayar di Muka	337.950.155	409.477.477
~ Beban Ditangguhkan - net	135.475.809	149.728.317
~ BDD Safe Deposit Box	4.813.336	25.140.832
~ Jaminan Safe Deposit Box	57.184.402	-
~ Rupa-Rupa Aset Lainnya	15.500.000	-
~ DPLK AXA Mandiri Finance	225.786.100	-
~ Lainnya	178.573.871	93.625.212
Jumlah Aset Lain-lain	**955.283.673**	**677.971.838**

Perusahaan telah menghitung dan mengakui liabilitas imbalan kerja yang diestimasikan berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020, dan untuk periode 31 Desember 2024 perhitungan imbalan pasca kerja dihitung dan dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT AXA Mandiri Financial Services berdasarkan pada perjanjian kerjasama pengelolaan dana kompensasi pasca kerja No. 00006/DPLK-AXA Mandiri/11/2024 tanggal 19 Februari 2024.

10. Kewajiban Segera Dibayar

	31-Des-2024	31-Des-2023
Titipan Premi Asuransi Kendaraan	475.500	3.247.000
Titipan Premi Asuransi Pembiayaan	8.179.950	6.063.150
Pajak PPh Pasal 21	53.294.606	49.629.076
Pajak PPh Pasal 23	131.020	22.273.242
Titipan Premi Asuransi Kebakaran	955.990	1.465.003
PPN Keluaran	55.000	-
Hutang BPJS (Kesehatan)	9.444.821	8.299.695
Pajak atas Bunga Tabungan	3.366.758	2.958.203
Pajak atas Bunga Deposito	51.528.136	53.226.275
Titipan Layanan Open Bank	15.960.176	-
Titipan Lainnya	9.571.699	26.509.199
Jumlah Kewajiban Segera	**152.963.656**	**173.670.843**

11. Utang Bunga

	31-Des-2024	31-Des-2023
Beban Bunga Deposito Yang Masih Harus Dibayar	499.144.750	208.943.138
Beban Bunga Deposito Jatuh Tempo	28.854.895	29.754.899
Jumlah Utang Bunga	**527.999.645**	**238.698.037**

12. Utang Pajak

	31-Des-2024	31-Des-2023
Pajak PPh Pasal 29	55.310.568	186.297.038
Jumlah Utang Pajak	**55.310.568**	**186.297.038**

Taksiran Pajak Penghasilan

Taksiran Pajak Penghasilan tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp.633.498.649,- dan Rp. 501.505.374,- dengan penghitungan sebagai berikut:

	31-Des-2024	31-Des-2023
Pendapatan Tahun 2024 dan 2023		
- Pendapatan Bunga	18.395.505.203	12.597.055.662
- Pendapatan Operasional Lainnya	641.940.151	602.814.503
- Pendapatan Non Operasional	215.447.929	380.479.838
Total Pendapatan	19.252.893.283	13.580.350.004
Laba Komersil	**3.106.651.657**	**2.514.069.955**
Koreksi Positif		
Beban Cadangan THR	182.966.356	250.027.394
Beban Cadangan Imbalan Pasca Kerja	225.786.100	4.800.000
Total Beban Cadangan	408.752.456	254.827.394
Koreksi Negatif		
Beban Tenaga Kerja	225.786.100	-
Pendapatan Bunga	7.002	10.072
Total	225.793.102	10.072
Laba Fiskal	3.289.611.011	2.768.907.421

12. **Utang Pajak** (Lanjutan)

	31-Des-2024	31-Des-2023
Pembulatan	3.289.611.000	2.768.907.659
Bagian LKP yang memperoleh Fasilitas	820.143.371	978.675.569
Bagian LKP yang tidak memperoleh Fasilitas	2.469.467.629	1.790.232.090
Beban Pajak Kini		
22% x 50% x Rp 820.143.371,-	90.215.771	107.654.313
22% x Rp 2.469.467.629,-	543.282.878	393.851.060
Taksiran Pajak Penghasilan Badan	633.498.649	501.505.374
Kredit Pajak	578.188.081	315.208.336
Utang PPh Pasal 29	**55.310.568**	**186.297.038**

13. **Simpanan**

Terdiri dari :	31-Des-2024	31-Des-2023
Tabungan		
~ Tabungan Depo Hajatan	317.925.983	116.717.310
~ Tabungan Depo Harian	3.997.403.798	3.778.835.652
~ Tabungan TabunganKu	1.817.226.411	1.687.132.155
~ Tabungan Depo Harian Mikro	692.252	692.252
~ Tabungan Depo Arisan	38.300.000	-
Jumlah Tabungan	**6.171.548.444**	**5.583.377.369**
Deposito Berjangka		
~ Deposito Depo Mitra JW 1 bulan	24.798.634.359	17.134.271.761
~ Deposito Depo Mitra JW 3 bulan	1.936.093.112	4.268.399.942
~ Deposito Depo Mitra JW 6 bulan	9.401.882.152	6.810.468.522
~ Deposito Depo Mitra JW 12 bulan	23.799.884.368	23.728.412.373
Jumlah Deposito Berjangka	59.936.493.992	51.941.552.598
Jumlah Simpanan	**66.108.042.436**	**57.524.929.968**

14. **Simpanan dari Bank Lain**

	31-Des-2024	31-Des-2023
~ Deposito dari BPR Arthadamas Mandiri	500.000.000	800.000.000
~ Deposito dari BPR Supra Arta Persada	1.000.000.000	-
~ Deposito dari BPR Panca Dana Rakyat	-	500.000.000
~ Deposito dari BPR Prima Sejahtera	250.000.000	500.000.000
~ Deposito dari BPR Dana Nagoya	-	1.000.000.000
~ Deposito dari BPR Apta Sejahtera	-	600.000.000
~ Deposito dari BPR Dana Lestari	-	150.000.000
~ Deposito dari BPR Cibitung Permai	200.000.000	500.000.000
~ Deposito dari BPR Mitra Prima Lestari	-	1.500.000.000
~ Deposito dari BPR Multi Artha	500.000.000	1.000.000.000
~ Deposito dari BPR Bank Boyolali	500.000.000	500.000.000
~ Deposito dari BPR Xen	1.000.000.000	1.000.000.000
~ Deposito dari BPR Indomitra Artha	-	300.000.000
~ Deposito dari BPR Hasa Mitra	-	1.000.000.000
~ Deposito dari BPR Nusantara Bona Pasogit 15	1.000.000.000	-
~ Deposito dari BPR Daya Lumbung Asia	1.500.000.000	1.500.000.000
Saldo Dilanjutkan	**6.450.000.000**	**10.850.000.000**

14. Simpanan dari Bank Lain

	31-Des-2024	31-Des-2023
Saldo Lanjutan	**6.450.000.000**	**10.850.000.000**
~ Deposito dari BPR Metropolitan	500.000.000	300.000.000
~ Deposito dari BPR Lestari Bali	1.000.000.000	2.000.000.000
~ Deposito dari BPR Indra Candra	1.000.000.000	1.000.000.000
~ Deposito dari BPR Kranji Krida	-	500.000.000
~ Deposito dari BPR Prismaberlian Danarta	350.000.000	250.000.000
~ Deposito dari BPR Cahaya Arthasejati	-	2.000.000.000
~ Deposito dari BPR Darmawan Adhiguna	-	1.000.000.000
~ Deposito dari BPR Sukma Kemang Agung	1.000.000.000	1.000.000.000
~ Deposito dari BPR Koinworks Sejahtera	-	500.000.000
~ Deposito dari BPR Mangga Jaya Utama	-	500.000.000
~ Deposito dari BPR Multi Sembada Dana	1.500.000.000	1.000.000.000
~ Deposito dari BPR Hasa Mitra Jawa	500.000.000	500.000.000
~ Deposito dari BPR Akar Budaya Dana Indonesia	1.000.000.000	-
~ Deposito dari BPR Brata Bhakti Sejahtera	100.000.000	-
~ Deposito dari BPR Mitra Telagasari Utama	1.000.000.000	-
~ Deposito dari BPR Surya Yudhakencana	2.000.000.000	-
~ Deposito dari BPR Lestari Banten	1.500.000.000	-
~ Deposito dari BPR Lestari Jakarta	1.800.000.000	-
Jumlah Simpanan dari Bank lain	**19.700.000.000**	**21.400.000.000**

15. Pinjaman Yang Diterima

	31-Des-2024	31-Des-2023
Terdiri dari :		
Bank Jabar Banten	6.183.333.331	199.999.981
Pinjaman yang diterima	6.183.333.331	199.999.981
Provisi Pinjaman Yang Diterima	(16.033.336)	(1.000.019)
Jumlah Pinjaman yang diterima	**6.167.299.995**	**198.999.962**

Nama Bank Pemberi pinjaman	: **PT. BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk**
Nomor/tanggal perjanjian	: 145/GMA-KOM/2024, tanggal 21 Mei 2024
Fasilitas Kredit	: Kredit Modal Kerja (KMK) BPR Instalment Loan dengan sifat kredit Non- Revolving
Jumlah Fasilitas Kredit	: Rp. 7.000.000.000 (Tujuh Milyar Rupiah)
Bunga	: 10%
Provisi	: 0,25%
Jangka waktu	: 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun
Jaminan	: a. Piutang lancar (kol 1) tanpa tunggaan sebesar 100% dari outstanding b. Cash collateral dalam bentuk giro/tabungan/deposito yang ditempatkan di BANK minimal 5% (lima persen) dari nominal fasilitas yang ditarik dan dibentuk per penarikan

16. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

	31-Des-2024	31-Des-2023
~ Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	225.786.100	66.964.500
Jumlah Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	**225.786.100**	**66.964.500**

Perusahaan telah menghitung dan mengakui liabilitas imbalan kerja yang diestimasikan berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020, dan untuk periode 31 Desember 2024 perhitungan imbalan pasca kerja dihitung dan dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT AXA Mandiri Financial Services berdasarkan pada perjanjian kerjasama pengelolaan dana kompensasi pasca kerja No. 00006/DPLK-AXA Mandiri/11/2024 tanggal 19 Februari 2024.

17. Kewajiban Lain-lain

	31-Des-2024	31-Des-2023
Terdiri dari :		
~ Rupa-Rupa Pasiva Biaya Tenaga Kerja	190.528.744	196.717.917
~ Rupa-Rupa Pasiva Biaya Pendidikan	-	68.388.563
~ Rupa-Rupa Pasiva Dana Diterima	142.885.820	46.948.857
~ Lain-lain	78.799.949	53.628.066
Jumlah Kewajiban Lain-lain	**412.214.513**	**365.683.403**

18. Modal

Sesuai dengan Akta No. 655 tanggal 31 Januari 2024 oleh Notaris Isa Meilia, S.H.,M.Kn komposisi kepemilikan saham per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Nama	Lembar	Persentase	Jumlah
1. PT. Hajar Aswad Tani Indonesia	5.464	95%	5.464.000.000
2. Fasika Khaerul Zaman	287	5%	287.000.000
Jumlah	**5.751**	**100%**	**5.751.000.000**

19. Pendapatan Operasional

	31-Des-2024	31-Des-2023
a. Pendapatan Bunga dari Bank Lain		
Penempatan pada bank lain :		
- Giro Bank Lain	23.298.260	14.374.715
- Tabungan	135.224.455	50.276.866
- Deposito Berjangka	1.470.179.655	1.264.234.096
Jumlah Pendapatan bunga penempatan pada Bank lain	**1.628.702.369**	**1.328.885.676**
b. Pendapatan Bunga dari Pinjaman yang Diberikan		
- Bunga Kredit Lancar	14.951.798.376	9.503.925.962
- Bunga Kredit Kurang Lancar	757.781.933	680.750.034
- Bunga Kredit Diragukan	64.424.396	72.982.225
Jumlah Pendapatan Bunga dari Pinjaman yang Diberikan	**15.774.004.705**	**10.257.658.221**
Jumlah Pendapatan Bunga Kontraktual	**17.402.707.074**	**11.586.543.898**
c. Pendapatan Provisi & Komisi		
- Provisi Kredit	992.798.129	1.010.511.765
Jumlah Pendapatan & Komisi	**992.798.129**	**1.010.511.765**
Jumlah Pendapatan Bunga	**18.395.505.203**	**12.597.055.662**

20. Beban Bunga

	31-Des-2024	31-Des-2023
a. Beban Bunga Kontraktual		
Beban Bunga Tabungan Kepada Pihak Ketiga Non Bank	226.513.560	233.850.381
Beban Bunga Deposito Kepada Pihak Ketiga Non Bank	7.042.465.984	2.799.830.273
Beban Bunga Simpanan Kepada Bank Lain	1.391.493.453	1.138.864.116
Beban Bunga Pinjaman Kepada Bank Lain	377.729.630	93.464.707
Beban Bunga Pinjaman Kepada Pihak Ketiga Non Bank	17.126.094	4.415.766
Beban Premi Lembaga Penjamin Simpanan	328.783.354	138.534.115
Beban Lainnya selain biaya bunga	32.055.787	35.010.367
Jumlah Beban Bunga Kontraktual	**9.416.167.862**	**4.443.969.724**

20. **Beban Bunga** (Lanjutan)

	31-Des-2024	31-Des-2023
b. **Amortisasi Biaya Transaksi**		
Amortisasi Biaya Transaksi Kepada Pihak Ketiga Non Bank		
Beban Provisi & Adm.Pinjaman Pihak Ketiga Non Bank	(28.589.104)	(29.143.722)
Jumlah Beban Provisi & Adm. Pinjaman Pihak Ketiga Non Bank	**(28.589.104)**	**(29.143.722)**
Pendapatan (Beban) Bunga Bank	**8.979.337.342**	**8.153.085.938**

21. **Pendapatan Operasional Lainnya**

	31-Des-2024	31-Des-2023
- Penerimaan Kredit Yang Dihapusbuku	-	1.392.000
- Pendapatan denda	395.596.509	573.244.759
- Pendapatan penagihan	12.440.000	11.885.000
- Pendapatan Lainnya	233.903.642	16.292.744
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	**641.940.151**	**602.814.503**

22. **Beban Operasional**
Terdiri dari

	31-Des-2024	31-Des-2023
Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif		
Beban PPAP Kredit & Dana	-	643.302.054
Jumlah Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	**-**	**643.302.054**
Beban Pemasaran		
Beban Kerja sama Pemasaran - Kredit	436.623.387	466.478.615
Jumlah Beban Pemasaran	**436.623.387**	**466.478.615**
Beban Administrasi dan Umum		
a. **Beban Tenaga Kerja**		
Gaji Pegawai Direksi & Karyawan	3.337.887.329	3.432.675.625
Honorarium Pengawas/Komisaris	275.980.486	175.152.105
Pesangon	170.000.000	-
Purna Jabatan	242.139.500	-
Pendidikan	106.158.275	95.436.450
Jumlah Beban Tenaga Kerja	**4.132.165.590**	**3.703.264.180**
b. **Beban Sewa**		
Sewa Gedung	449.531.858	361.665.180
Sewa SDB	23.358.640	28.170.810
Jumlah Beban Sewa	**472.890.498**	**389.835.990**
c. **Beban Premi Asuransi**		
Beban Premi Asuransi Kerugian	23.826.600	16.377.206
Beban Premi Asuransi Gedung & Inventaris	2.915.218	1.086.343
Jumlah Premi Asuransi	**26.741.817**	**17.463.549**
d. **Beban Pajak**		
Pajak IPEDA	10.864.600	-
Pajak Kendaraan Roda Dua	442.500	1.203.800
Pajak Kendaraan Roda Empat	7.954.300	8.605.300
Jumlah Beban Pajak	**19.261.400**	**9.809.100**

22. **Beban Operasional** (Lanjutan)

	31-Des-2024	31-Des-2023
e. Beban Pemeliharaan		
Pemeliharaan Gedung Kantor Jasa	11.326.530	250.000
Pemeliharaan Gedung Kantor Bahan	-	1.609.000
Pemeliharaan Perabot Kantor	7.552.610	11.787.500
Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	14.944.514	20.682.151
Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	1.223.000	2.977.000
Pemeliharaan Renovasi Gedung	74.192.508	38.228.508
Jumlah Beban Pemeliharaan	**109.239.162**	**75.534.159**
f. Beban Penyusutan Aset Tetap		
Amortisasi Program Aplikasi	3.815.625	-
Penyusutan Bangunan Bukan Sewa Pembiayaan	2.954.064	2.954.064
Penyusutan Peralatan Bukan Sewa Pembiayaan	248.318.933	152.651.706
Penyusutan Kendaraan Bukan Sewa Pembiayaan	60.225.000	60.225.006
Jumlah Beban Penyusutan Inventaris	**315.313.622**	**215.830.776**
g. Beban Barang dan Jasa		
Cetakan	6.696.000	7.022.000
ATK	24.726.304	22.835.300
Foto copy	10.886.865	8.519.348
Materai	3.173.000	2.660.500
BBM	42.319.534	51.587.430
Listrik & PAM	73.605.321	56.453.824
Telephone	60.758.306	54.968.085
Makan Lembur	17.027.365	6.000.699
Transport Dinas Kantor	11.307.425	1.042.000
Perjamuan Tamu	15.440.470	9.161.159
Umum Lainnya	277.949.874	267.643.641
Akuntan	28.860.000	27.750.000
Program Sistem	34.991.581	27.226.861
Notaris	31.750.000	19.950.000
Jasa Kerja Sama Pemasaran	35.150.432	97.327.889
Jasa Kerja Sama Umum	310.011.505	221.666.185
Jumlah Beban Barang dan Jasa	**984.653.982**	**881.814.921**
Total Beban Administrasi Dan Umum	**6.060.266.071**	**5.293.552.675**
Beban Operasional Lainnya		
Promosi Usaha	8.602.982	-
Iuran Perbarindo	6.500.000	5.500.000
Perjalanan Dinas Pegawai	25.554.246	2.332.200
Provisi dan Adm. Kredit	-	18.000
Administrasi Bank (Pot.Adm & Pajak)	12.490.214	12.137.672
Retribusi, Tol & Parkir	43.597.000	31.617.000
Pantry	9.579.220	11.299.815
Iuran Lingkungan	37.236.196	27.754.751
Lainnya	42.247.240	89.576.871
Jumlah Beban Operasional Lainnya	**185.807.098**	**180.236.309**
Total Beban Operasional	**6.682.696.556**	**6.583.569.653**

23. Pendapatan (Beban) Non Operasional

	31-Des-2024	31-Des-2023
Pendapatan Non Operasional :		
Pendapatan Non Operasional Lainnya	215.428.969	380.418.127
Pendapatan Non Operasional Pembulatan	18.960	61.711
	215.447.929	380.479.838
Beban Non Operasional :		
BNO- Lainnya	(47.375.243)	(38.738.693)
Beban Pembulatan	(1.964)	(1.978)
	(47.377.207)	(38.740.671)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional	**168.070.721**	**341.739.167**

24. Perhitungan Kebutuhan Modal Minimum

	31-Des-2024	31-Des-2023
1. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)		
- Giro, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, dll	6.794.658.954	6.054.739.554
- Kredit dengan Agunan berupa tanah dan rumah tingggal/toko/ kantor yang diikat oleh hak tanggungan	8.274.118.112	6.700.523.152
- Kredit kepada pegawai/pensiunan	900.783	9.327.148
- Kredit dengan Agunan berupa tanah dan rumah tingggal/toko/ kantor yang di kuasai oleh BPR namun tidak diikat hak tanggungan	1.587.148.961	2.016.138.718
- Kredit kepada usaha Mikro dan Kecil	-	910.784.336
- Kredit dengan pengikatan fidusia	-	-
- Kredit dengan pengikatan Hak Tanggungan Pertama	-	-
- Kredit yang tidak dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Pertama	-	-
- Tagihan dan kredit lainnya	-	-
- Tagihan Kredit Macet	-	-
- Kredit dengan Agunan berupa kendaraan bermotor yang telah dilakukan pengikatan fidusia	-	-
- kredit lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot risikodi atas	11.325.134.415	55.091.683.727
- Kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet	3.341.930.365	252.389.655
- Aktiva Tetap dan Inventaris (Nilai Buku)	1.850.859.885	2.086.823.607
- Aktiva Lainnya	1.810.418.505	1.887.980.209
Jumlah ATMR	**34.985.169.978**	**75.010.390.106**
2. Modal		
- Modal Inti	13.671.721.070	12.545.167.138
- Modal Pelengkap	154.377.178	127.535.304
	13.826.098.248	12.672.702.442
3. Modal Minimum (12% X ATMR)	4.198.220.397	6.000.831.208
4. Jumlah Kekurangan/Kelebihan KPMM	9.627.877.850	6.671.871.234
5. Rasio KPMM (CAR)	39,52%	16,89%

25. Analisa Laporan Keuangan

		2024	2023
a.	Rasio KPMM (CAR)	39,52%	16,89%
b.	Rasio Modal Inti	39,08%	16,72%
c.	Non Performing Loan (NPL)	3,88%	2,03%
d.	Pemenuhan PPAP (PPAP)	100%	100,00%
e.	Return On Equity (ROE)	18,09%	14,85%
f.	Return On Asset (ROA)	2,21%	2,99%
g.	BOPO	84,54%	83,54%
h.	Cash Ratio	9,28%	9,78%
i.	Loan To Debt Ratio (LDR)	109,82%	107,82%
j	Modal Inti Terhadap Aset Produktif Bermasalah	485,09%	998,33%
k	Net Interes Margin	5,79%	9,84%

26. Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang perlu di ungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan ini.

25. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen perusahaan bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan yang diselesaikan pada tanggal 15 Januari 2025